

Tahun 2016

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Kabupaten Lombok Timur



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

KATALOG DALAM TERBITAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016

Nomor Publikasi :

Ukuran Buku : 18 X 25 cm

Jumlah Halaman : 140 + xi

Naskah : Tim Penyusun PDRB Kab. Lombok Timur

Gambar Kulit : Tim Penyusun PDRB Kab. Lombok Timur

Diterbitkan Oleh : Tim Penyusun PDRB Kab. Lombok Timur

Dicetak Oleh :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiem

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Bijaksana, kami menyambut baik terbitnya Buku PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016. Buku ini berisi series PDRB Kabupaten Lombok Timur menurut lapangan usaha dan penggunaan tahun 2011-2015 dengan penghitungan harga berlaku serta harga konstan 2010.

Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pemakai data seperti kalangan dunia usaha, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan PDRB seperti pemangku kebijakan dalam membuat perencanaan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator kinerja perkembangan ekonomi yang tercermin pada statistik PDRB dalam buku ini hendaknya dijadikan acuan membangkitkan inspirasi, ide, pengambilan langkah-langkah kegiatan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja kita bersama.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan sehingga terwujudnya publikasi ini. Kami menyadari publikasi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan kita bersama. Amin.

Selong, Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala,

ACHMAD DEWANTO HADI, ST. MT.

i

DAFTAR ISI

KATA PE	NGANTAR	i
DAFTAR	ISI	ii
DAFTAR	GRAFIK	v
DAFTAR	TABEL	vi
DAFTAR	LAMPIRAN	viii
PENJELA	SAN TEKNIS	x
I. PENJE	ASAN UMUM	1
1.1	Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2	Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	2
1.3	Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	2
II. RUAN	G LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	8
2.1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8
2.2	Pertambangan dan Penggalian	14
2.3	Industri Pengolahan	16
2.4	Pengadaan Listrik dan Gas	23
2.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	25
2.6	Konstruksi	26
2.7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27
2.8	Transportasi dan Pergudangan	29
2.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34
2.10	Informasi dan Komunikasi	35
2.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37
2.12	Real Estat	46
2.13	Jasa Perusahaan	46
2.14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	48
2.15	Jasa Pendidikan	49
2.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50
2.17	Jasa Lainnya	51
ii	PDRB Kabupaten Lombok Tim	ur Tahun 2016

III. ME	TODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA	54
PDRB	MENURUT PENGELUARAN	54
3.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	54
3.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	57
3.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	59
3.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	62
3.5	Perubahan Inventori	67
3.6	Ekspor Impor	71
IV. TIN	IJAUAN EKONOMI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	74
4.1	Struktur Ekonomi	74
4.2	Pertumbuhan Ekonomi	76
4.3	PDRB Perkapita	79
4.4	Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha	80
a.	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	80
b.	Pertambangan dan Penggalian	81
c.	Industri Pengolahan	82
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	83
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	84
f.	Konstruksi	85
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	85
h.	Transportasi dan Pergudangan	86
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87
j.	Informasi dan Komunikasi	88
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	89
I.	Real Estat	90
m.	Jasa Perusahaan	91
n.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	91
0.	Jasa Pendidikan	92
p.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93
q.	Jasa lainnya	93

V	. PDRB L	OMBOK TIMUR MENURUT PENGELUARAN	95
	5.1.	Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	98
	5.2.	Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	100
	5.3.	Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	100
	5.4.	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	101
	5.5.	Perkembangan Perubahan Inventori	103
	5.6.	Perkembangan Ekspor Barang Dan Jasa Luar Negeri	104
	5.7.	Perkembangan Impor Barang Dan Jasa Luar Negeri	105
	5.8.	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kontribusi Kategori/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2015 (Persen) 7
Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan Tahun 2011-2015 (Persen) 7
Grafik 3 Sumbangan Pertumbuhan Kategori Terhadap Pertumbuhan Total 7
Grafik 4 PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Tahun 2011-2015 8
Grafik 5 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Tahun
2011-2015 8
Grafik 6 PDRB Kategori Konstruksi Tahun 2011-2015 (Juta Rp)8
Grafik 7 PDRB Kategori Informasi & Komunikasi Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB 5
Tabel 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha 6
Tabel 3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran 7
Tabel 4 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–201575
Tabel 5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015 78
Tabel 6 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Tahun 2015**81
Tabel 7 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan
Tabel 8 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Listrik dan Gas Tahun 2011- 201584
Tabel 9 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2010-2015
Tabel 10 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2011-2015
Tabel 11 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan
Tabel 12 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi 88
Tabel 13 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2011- 201590
Tabel 14 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Real Estate (Persen)90
Tabel 15 GDRP, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Tahun 2011- 201591
Tabel 16 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2011-2015 92

Tabel 17 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Pendidikan (Persen) Tahun
2011-2015
Tabel 18 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial (Persen) Tahun 2011-2015
Tabel 19 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Lainnya (Persen) Tahun
2011-2015
Tabel 20. PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur 95
Tabel 21. Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur 96
Tabel 22. PDRB adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur 97
Tabel 23. Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok
Timur Tahun98
Tabel 24. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok
Timur, Tahun 2011 – 2015
Tabel 25. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kab. Lombok Timur, 99
Tabel 26. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Timur, 100
Tabel 27. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur, Tahun 2011 – 2015 101
Tabel 28. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Timur,
Tabel 29. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Timur, 103
Tabel 30. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur, 104
Tabel 31. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur, 106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga
	Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2011–2015 113
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga
	Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2011–2015 115
Lampiran 3.	Distribusi Persentase PDRB Kababupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga
	Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 117
Lampiran 4.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga
	Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 119
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku
	Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 (Persen)
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga
	Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 (Persen)
Lampiran 7.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok
	Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010=100),
	2011–2015
Lampiran 8.	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok
	Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (2010=100),
	2011–2015
Lampiran 9.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok
	Timur Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2011–2015
Lampiran 10	D. Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut Pengeluaran
	Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Juta Rp) 131
Lampiran 11	
	Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Juta Rp)132

Lampiran 12. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut
Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen) 134
Lampiran 13. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015
(Persen)
Lampiran 14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut
Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen) 136
Lampiran 15. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan Menurut
Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen) 137
Lampiran 16. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015,
(2010=100)
Lampiran 17. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan
Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015,
(2010=100)
Lampiran 18. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut
Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015, (2010=100) . 140

PENJELASAN TEKNIS

- Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai "Sistem Neraca Nasional". Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
- 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
- 3. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci berdasarkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
- 4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Harga Berlaku adalah penilaian dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga Konstan adalah penilaian dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.

- 5. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
- 6. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

I. PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan

produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategorikategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
- 5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara

China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain:

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk
 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index / PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

Konsep dan Cakupan: Perlakuan Work-in Progress (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR):

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari Imputed Bank
 Services Charge (IBSC) menjadi Financial Intermediation Services Indirectly
 Measured (FISIM)
- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (Basic Price).
 Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

• Klasifikasi:

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional Standard Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

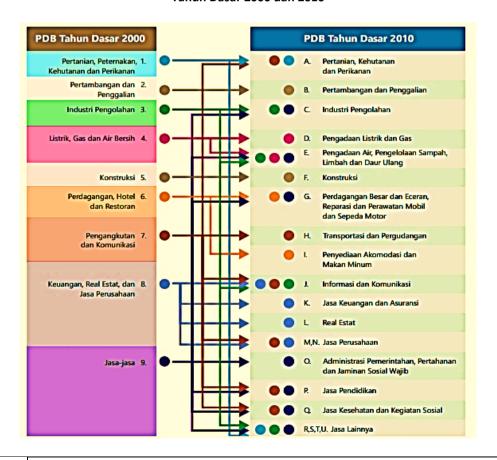
Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode Imputed Bank Services Charge (IBSC) .	Menggunakan metode Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)
Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 3 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010



II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya

yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Subdit Statistik Hortikultura, BPS. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman hortikultura dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan

perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dan sebagainya.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus

Pertanian dan Survei Perusahaan Peternakan (Ternak Besar dan Kecil, Ternak Unggas, dan Sapi Perah) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Peternakan BPS.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Subdit Neraca Barang BPS. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.2 Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Data produksi kayu bulat dan hasil hutan lainnya berasal dari Perum Perhutani, Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Kehutanan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan kehutanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Kehutanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Kehutanan BPS.

2.1.3 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masingmasing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat penen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resources (CBR)*. Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiaptiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Subkategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Subkategori ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Statistik Pertambangan Migas BPS. Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price (ICP)*, harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik

pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. Untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku dan konstan 2010 digunakan dengan cara yang sama seperti pada subkategori pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas - BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi /Kabupaten/Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainya mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih besi, pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, alumunium (bauksit), tembaga, timah, seng, timah hitam, mangaan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.2.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya

Subkategori ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian. Output dan produksi barang-barang galian terdapat pada publikasi Statistik penggalian tahunan. Sementara itu PDB triwulan di estimasi menggunakan data produksi bahan galian dari Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi (DNP).

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

Subkategori ini mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan

butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri Minuman mencakup pembuatan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk the dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Subkategori ini meliputi pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (snuff), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lainlain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Subkategori ini juga

mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi, pakaian sesuai pesanan, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Subkategori ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Subkategori ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

Subkategori ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, Subkategori ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Subkategori mencakup ini tidak pembuatan mebeler, perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subkategori ini merupakan gabungan dari dua subkategori yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan; proses pencetakan termasuk bermacam-macam metode/cara untuk memindahkan suatu image dari piringan atau layar monitor ke suatu media melalui/dengan berbagai teknologi pencetakan. KBLI 2009: kode 17 dan 18.

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Subkategori ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Subkategori ini mencakup pembuatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini,

misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk disini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Subkategori ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi. Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009: kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Subkategori ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27.

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam Subkategori Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen

mekaniknya. yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus. Subkategori ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Subkategori ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009: kode 29 dan 30.

2.3.15 Industri Furnitur

Industri Furnitur mencakup pembuatan mebeller dan produk yang berkaitan yang terbuat dari berbagai bahan kecuali batu, semen dan keramik. Pengolahan pembuatan mebeller adalah metode standar, yaitu pembentukan bahan dan perakitan komponen, termasuk pemotongan, pencetakan dan pelapisan. Perancangan produk baik untuk estetika dan kualitas fungsi adalah aspek yang penting dalam proses produksi. Pembuatan mebeller cenderung menjadi kegiatan yang khusus. KBLI 2009: kode 31.

2.3.16 Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

Subkategori ini mencakup pembuatan berbagai macam barang yang belum dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Subkategori ini merupakan gabungan dari industri pengolahan lainnya dan jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan. Subkategori ini bersifat residual, proses produksi, bahan input dan penggunaan barang-

barang yang dihasilkan dapat berubah-ubah secara luas dan ukuran umum. Subkategori ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. Tetapi mencakup perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan khusus barang-barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya. KBLI 2009: kode 32 dan 33.

Sumber data Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari: Data produksi Pengilangan Migas diperoleh dari, Ditjen Migas, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Data produksi/indikator produksi Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Industri-BPS. Data harga produk pengilangan minyak bumi diperoleh dari Ditjen Migas, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga LNG diperoleh dari harga ekspor LNG dari Direktorat Statistik Distribusi-BPS, kurs ekspor dari Direktorat Neraca Pengeluaran - BPS, sedangkan indikator harga untuk Industri Batubara diperoleh dari Direktorat Statistik Harga-BPS. Data struktur biaya diperoleh dari Publikasi Statistik Pertambangan Migas-BPS.

Sumber data Industri Makanan dan Minuman sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan terdiri dari: Produksi/Indikator Produksi yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Indeks produksi Industri Besar Sedang (IBS) dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) diperoleh dari Direktorat Statistik Industri - BPS. Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga - BPS. Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK - BPS ditambah dengan berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh

dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan

Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan subkategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Subkategori ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara(PLN) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta

(perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Data yang diperlukan data produksi dan harga. Data produksi berupa listrik terjual dan listrik dibangkitkan baik oleh PLN maupun non-PLN. Sama seperti data produksi, harga juga mencakup harga penjualan dan harga pembangkitan, Baik data produksi maupun data harga, diambil dari PT. PLN setiap triwulan dan juga statistic PLN yang terbit setiap tahun. Selain itu juga diperlukan data subsidi listrik dari Kementerian Keuangan.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Subkategori ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Subkategori ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas,

energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/ minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi,

yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan Sampah/ Limbah dengan pendekatan pendapatan.

Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh

Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data Produksi adalah BPS - Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen - BPS; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih – BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi

pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Ouput harga berlaku adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara konsumsi antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari konsumsi antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik Ekspor-BPS dan Asosiasi Semen Indonesia (ASI); impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari Subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik

penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Subkategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam subkategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "commodity flow approach". Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan. Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi, dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai,

danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta *jasa angkutan dengan saluran pipa* untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku merupakan perkalian antara indikator produksi (jumlah kendaran wajib uji) dengan indikator harga (rata-rata output untuk masing-masing jenis alat angkutan). Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan menggunakan

metode ekstrapolasi dengan indeks jumlah kendaraan sebagai ekstrapolatornya. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementrian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi.Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional.Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode

ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya untuk masing-masing harga tersebut.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti: PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Subkategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan subkategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik

atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar

dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat Pembinaan Kesenian dan perfilman, Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom, Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan ini mencakup kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara

Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputasi jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual suratsurat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biayabiaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan. Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

Asuransi dan Reasuransi

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil *underwriting*, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. NTB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen, BPS.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas

dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi mencakup kegiatan *leasing*, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

Pegadaian

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Modal Ventura

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK)

umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan modal ventura diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Manager Investasi

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi untuk output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Wali Amanat

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Penukaran Mata Uang

Jasa penukaran mata uang (*money changer*) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan broker asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N

antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Hukum

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya, termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

Periklanan

Periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

Jasa Penyaluran Tenaga Kerja

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

Jasa Kebersihan Umum Bangunan

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan untuk menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundangundangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundangundangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), BPS; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah; Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan

pendekatan pendekatan produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran BPS; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

Kegiatan Jasa Lainnya

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Data diperoleh dari internal BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, and Subdirektorat Statistik Harga Konsumen).

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan

Kegiatan ini berkategori T mencakup kegiatan yang memanfaatkan jasa perorangan untuk melayani rumah tangga yang didalamnya termasuk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan

barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdirektorat Pertambangan, Energi dan Konstruksi (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Pengeluaran.

Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya

Kategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Health Organization (WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

III. METODE PENGHITUNGAN DAN SUMBER DATA PDRB MENURUT PENGELUARAN

3.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, adalah:

- Makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);
- Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;

- Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, tv, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- Barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- Jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh non-residen diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas.

Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

3.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/

olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- ➤ Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

 Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb:

$$\overline{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

 $\overset{-}{x_{ij}}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i: Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, ..., 7

j: jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, ..., 19

• Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \overline{x}_{ij} \times N_{i}$$

 $X: \mathsf{PK} ext{-}\mathsf{LNPRT}$ adh Berlaku

 N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

3.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan

jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- 2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/kota mencakup: PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; PK-Pemerintah Provinsi yang yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/kota; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/kota; PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut

PK-P adhb = Output non pasar - penjualan barang & jasa + output BI

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

3.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagai-nya;
- 2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masingmasing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (commodity flow approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (supply), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan. Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (entertainment, literary, or artistic original products), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film

diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio pengeluaran output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

3.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work*

in progress), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia.
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori

adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

3.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut
 Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi,
 pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

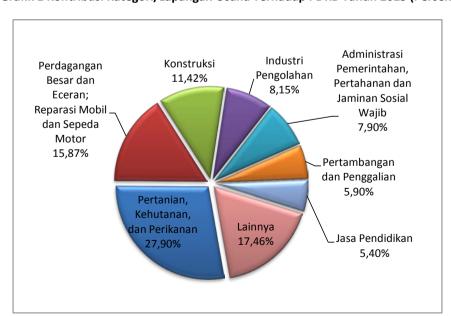
Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaski yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (*residu*) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

IV. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

4.1 Struktur Ekonomi

Kondisi geografis kabupaten Lombok Timur yang memiliki dataran rendah cukup luas memungkinkan aktifitas ekonomi sebagian besar masyarakat berhubungan dengan bidang pertanian (*agricultur*). Hal ini tercermin dari sebagian besar penduduk di Kabupaten Lombok Timur menggantungkan hidupnya disektor pertanian.

Struktur ekonomi suatu wilayah umumnya dilihat dari kontribusi masing-masing kategori terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi paling besar bagi pembentukan PDRB Lombok Timur. Pada tahun 2015 kategori ini menyumbang sekitar 27,90 persen, selanjutnya kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,87 persen); Kategori Konstruksi (11,50 persen); Kategori Industri Pengolahan (8,07 persen); Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,90 persen); Kategori Pertambangan dan Penggalian (5,904 persen) dan Kategori Jasa pendidikan (5,40 persen). Sementara kontibusi kategori lainnya masih dibawah 5 persen.



Grafik 1 Kontribusi Kategori/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Tahun 2015 (Persen)

Aktifitas ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan memberi dampak terhadap pergeseran struktur ekonomi. Pada periode 2011-2015 kontribusi Kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari 31,15 persen pada tahun 2011 menjadi 27,90 persen pada tahun 2015. Walaupun peranannya cenderung turun, kategori Pertanian masih menjadi basis ekonomi masyarakat Lombok Timur mengingat tingginya penyerapan tenaga kerja pada kategori ini, berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Agustus 2015), penduduk Lombok Timur usia 15 tahun keatas yang bekerja, sekitar 45,65 persen bekerja pada sektor pertanian.

Tabel 4 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,32	29,73	29,07	27,92	27,90
В	Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,65	5,69	5,74	5,90
С	Industri Pengolahan	9,75	9,54	9,02	8,78	8,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	11,04	10,83	10,85	10,90	11,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,28	14,83	15,18	15,80	15,87
Н	Transportasi dan Pergudangan	4,32	4,30	4,29	4,44	4,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,85	0,92	0,98	0,98
J	Informasi dan Komunikasi	1,81	1,80	1,81	1,78	1,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	2,16	2,30	2,34	2,39
L	Real Estat	3,30	3,44	3,58	3,66	3,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,33	7,36	7,49	7,92	7,90
Р	Jasa Pendidikan	5,10	5,19	5,43	5,37	5,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,12	2,07	2,12	2,13	2,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,01	1,99	2,01	1,99	1,99
Produk	Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Kontribusi kategori Industri pengolahan juga mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2011 sumbangan kategori ini mencapai 9,75 persen tahun 2015 turun menjadi 8,15 persen. Penurunun tersebut berkaitan dengan karakteristik industri pengolahan di Lombok Timur yang didominasi oleh pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE2006) sekitar 68,22 persen output industri di Lombok Timur berasal dari pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Dengan demikian kontribusi kategori industri pengolahan mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kontribusi kategori pertanian.

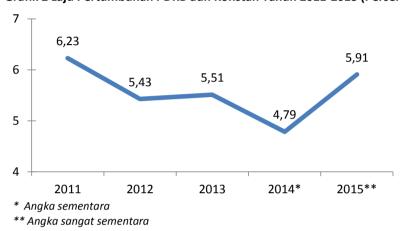
Disisi lain kontribusi kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 sumbangan kategori ini sekitar 14,28 persen, tahun 2015 meningkat lebih dari 1,5 persen menjadi 15,87 persen. Kategori lain yang mencatat peningkatan kontribusi cukup besar adalah kategori Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, pada tahun 2011 kontribusi kategori ini sekitar 7,33 persen tahun 2015 naik sekitar 0,57 persen menjadi 7,90 persen. Sementara kontibusi kategori lainnya relatif stabil dengan kenaikan/penurunan kurang dari 0,5 persen selama peride 2011-2015.

4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi dalam periode tertentu. Untuk melihat perkembangan nilai tambah, digunakan pendekatan PDRB yang dihitung menurut harga konstan pada tahun dasar yakni harga tahun 2010. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dapat dijadikan indikator perkembangan volume produksi barang dan jasa dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur periode 2011-2015 berkisar antara 4,79 persen sampai 6,23 persen dimana laju tertinggi dicapai tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,79 persen. Percepatan laju pertumbuhan tahun 2015 disebabkan peningkatan produksi beberapa komoditi pada

kategori pertanian, seperti padi dan beberapa palawija. Peningkatan produksi tersebut menyebabkan laju pertumbuhan kategori Pertanian naik dari 1,98 persen pada tahun 2014 menjadi 5,20 pada tahun 2015. Selain itu peningkatan pada kategori pertanian mendorong pertumbuhan kategori lain seperti industi (mengingat output pertanian menjadi input kategori industri selain untuk konsumsi langsung).



Grafik 2 Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan Tahun 2011-2015 (Persen)

Pada tahun 2015 seluruh kategori mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (9,79 persen) dan pertumbuhan paling kecil pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas (1,79 persen). Adapun kategori-kategori lainnya mencatat pertumbuhan antara 4,54 – 8,83 persen dengan urutan sebagai berikut, kategori Pertambangan dan Penggalian (8,83 persen), kategori Konstruksi (8,70 persen), kategori Informasi dan Komunikasi (7,98 persen), kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,40 Persen), kategori Perdagangan Besa dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,36 persen), kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,35 Persen), kategori Real Estate (6,26 persen), kategori Jasa Lainnya (6,07 persen), kategori Jasa Pendidikan (5,77 persen), kategori Pertanian (5,20 persen), kategori Transportasi dan Pergudangan (5,10 persen), kategori Jasa Perusahaan (4,87 persen), kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,06 persen), kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (3,67 persen), dan kategori Industri Pengolahan (2,54)

Tabel 5 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011-2015

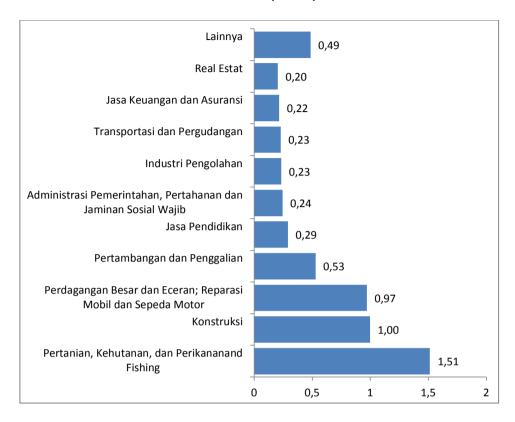
	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	4,46	3,51	1,98	5,20
В	Pertambangan dan Penggalian	6,55	7,39	7,22	6,16	8,83
С	Industri Pengolahan	2,62	5,10	1,20	1,68	2,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,01	11,38	4,58	39,05	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,81	1,47	5,92	5,04	4,06
F	Konstruksi	7,80	4,93	6,93	6,26	8,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,34	8,50	8,32	7,67	6,36
Н	Transportasi dan Pergudangan	5,76	5,84	5,38	6,86	5,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	5,91	7,42	6,59	6,40
J	Informasi dan Komunikasi	10,11	7,02	8,80	5,98	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,00	12,83	10,31	8,01	9,79
L	Real Estat	6,28	6,55	6,70	5,51	6,26
M,N	Jasa Perusahaan	6,92	7,56	6,55	6,46	4,87
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	1,83	4,92	5,93	3,67
Р	Jasa Pendidikan	7,46	3,89	7,99	6,73	5,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,57	3,52	7,89	6,43	6,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,63	4,17	7,33	5,13	6,07
Produk Do	omestik Regional Bruto	6,23	5,43	5,39	4,93	5,91

^{*} Angka sementara

Sumbangan masing-masing kategori terhadap total pertumbuhan dapat dilihat pada grafik 3. Kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share terbesar menyumbang 1,51 persen dari total pertumbuhan PDRB tahun 2015. Selanjutnya Kategori Konstruksi dengan sumbangan sebesar 1,00 persen diikuti Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 0,97 persen. Kategori Jasa keuangan dan Asuransi yang memiliki pertumbuhan paling tinggi tahun 2015 hanya menyumbang 0,22 persen, lebih kecil dibandingkan sumbangan pertumbuhan dari kategori Pertambangan dan Penggalian (0,53 persen), Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,24 persen), Kategori Industri Pengolahan (0,23 persen), dan Kategori Transportasi dan Pergudangan (0,23 persen).

^{**} Angka sangat sementara

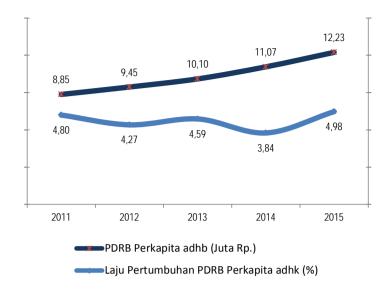
Grafik 3 Sumbangan Pertumbuhan Kategori Terhadap Pertumbuhan Total Tahun 2015 (Persen)



4.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan turunan PDRB yang menggambarkan rata-rata nilai tambah setiap satu orang penduduk. PDRB perkapita diperoleh dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Secara umum PDRB perkapita Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Lombok Timur mencapai 12,23 juta rupiah naik sebesar 2,16 juta rupiah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 10,07 juta rupiah. Pada periode tahun 2011-2015 pertumbuhan PDRB per kapita adh konstan berkisar antara 3,84 persen sampai 4,98 persen. Namun demikian peningkatan atau penurunan PDRB perkapita tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Grafik 4 PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Tahun 2011-2015



4.4 Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Lombok Timur menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dimana beberapa kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha masing-masing kategori diuraikan di bawah ini.

a. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori Perikanan. Pada tahun 2015 nilai tambah yang dihasilkan kategori ini sebesar Rp. 3,97 triliun naik sekitar Rp. 405,66 milyar dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 3,57 triliun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata peningkatan nilai tambah mencapai Rp. 241,13 milyar. Pada tahun 2015 kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,90 persen tidak berbeda jauh dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 29,92 persen. Subkategori tanaman pangan menjadi penyumbang terbesar dengan share

sekitar 82,40 persen, sedangkan subkategori perikanan mempunyai share sekitar 17,53 persen dan subkategori kehutanan kurang dari 1 persen.

Jika dinilai menggunakan harga konstan nilai tambah yang dihasilkan kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2015 sebesar Rp. 3,45 triliun mengalami peningkatan 5,20 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 3,28 triliun. Laju pertumbuhan tahun 2015, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,98 persen. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh subkategori Pertanian sebesar 5,32 persen, diikuti oleh subkategori Perikanan dengan laju pertumbuhan mencapai 4,61 persen, sementara laju pertumbuhan subkategori Kehutanan hanya 2,39 persen.

Tabel 6 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Tahun 2015**

	Lapangan Usaha	PDRB adh Berlaku (Milyar Rp)	Kontribusi Thd PDRB (%)	Kontribusi Thd Kategori (%)	PDRB adh Konstan (Milyar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.273,29	22,99	5,32	2.836,28	82,40
	a. Tanaman Pangan	1.513,76	10,63	8,55	1.327,78	38,10
	b. Tanaman Hortikultura	766,67	5,38	2,52	636,81	19,30
	c. Tanaman Perkebunan	454,14	3,19	-0,42	398,17	11,43
	d. Peternakan	418,98	2,94	5,16	364,15	10,55
	e. Jasa Pertanian & Perburuan	119,74	0,84	6,80	109,37	3,01
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,80	0,02	2,39	2,54	0,07
3	Perikanan	696,56	4,89	4,61	608,32	17,53
Pe	rtanian, Kehutanan, & Perikanan	3.972,65	27,90	100,00	3.447,15	5,20

^{*} Angka sementara

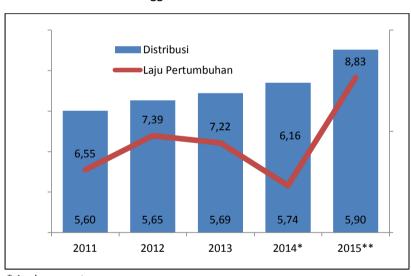
b. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Lombok Timur hanya mencakup subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Dalam 5 tahun tahun terakhir indikator produksi batu apung seperti jumlah perusahaan dan jumlah pekerja mengalami penurunan namun permintaan terhadap bahan galian untuk bangunan seperti

^{**} Angka sangat sementara

pasir dan batukali yang cukup tinggi menyebabkan kategori ini tetap mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2015 nilai tambah adh berlaku kategori Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 840,64 milyar meningkat Rp. 107,39 milyar dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 733,26 milyar, dalam 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini berkisar antara 5,60 - 5,90 persen.

Pada tahun 2015 nilai tambah adh konstan kategori Pertambangan dan penggalian mencapai Rp. 733,28 milyar mengalami peningkatan 8,83 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 673,78 milyar. Laju pertumbuhan tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar Rp. 6,16 persen. Pada periode 2011-2015 laju pertumbuhan PDRB kategori ini berkisar antara 6,16 sampai 8,83 persen.



Grafik 5 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Penggalian Tahun 2011-2015

c. Industri Pengolahan

PDRB adh berlaku kategori Industri pengolahan tahun 2011 sekitar Rp. 967,65 milyar, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1,16 triliun. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2010-2015 mengalami flukruasi dengan kecendrungan menurunan. Pada tahun 2011 share kategori Industri pengolahan

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

sekitar 10,25 persen, tahun 2015 turun menjadi 8,88 persen. Kontribusi industri pengolahan memiliki hubungan dengan produksi pertanian sebagai input bagi industri.

PDRB adh konstan kategori Industri pengolahan tahun 2015 sebesar Rp. 1,06 triliun mengalami pertumbuhan 2,54 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 1,033 triliun. Selama periode 2011-2015 laju pertumbuhan kategori industri pengolahan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013-2014 laju pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan dibawah 2 persen, sedangkan tahun 2012 mencapai pertumbuhan lebih dari 5 persen.

Tabel 7 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	967.654	1.021.740	1.041.763	1.121.822	1.159.903
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	9,75	9,54	9,02	8,78	8,15
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	955.549	1.004.265	1.016.283	1.033.332	1.059.592
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	2,62	5,10	1,20	1,68	2,54

^{*} Angka sementara

d. Pengadaan Listrik dan Gas

PDRB adh berlaku kategori Pengadaan Listrik dan Gas tahun 2011 sekitar Rp. 5,53 milyar tahun 2015 naik menjadi Rp. 8,97 milyar atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,44 milyar dalam 5 tahun terakhir. Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,06 persen terhadap PDRB Lombok Timur. Sekitar 99,76 persen nilai tambah kategori ini dihasilkan dari subkategori Ketenagalistrikan dan 0,24 persen lainnya oleh subkategori Pengadaan Gas dan Produksi Es. Laju pertumbuhan PDRB kategori ini pada tahun 2015 adalah sebesar 0,85 persen. Subkategori Ketenagalistrikan mencatatkan pertumbuhan 0,84 persen, sedangkan Pengadaan Gas dan Produksi Es mengalami pertumbuhan sebesar 3,45 persen pada tahun 2015.

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 8 PDRB. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Listrik dan Gas Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	5.533,69	6.296,89	5.564,82	7.804,26	8.971,53
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	6.117,27	6.813,62	7.125,56	9.908,00	9.991,89
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	7,01	11,38	4,58	39,05	0,85

^{*} Angka sementara

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penditribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2011-2015 kurang dari 1 persen (sekitar 0,08 persen). Pada tahun 2011 nilai tambah yang dihasilkan kategori ini sebesar Rp. 8,09 milyar tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 11,66 milyar. Jika dinilai menggunakan harga konstan nilai tambah kategori Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tahun 2011 sebesar Rp. 7,64 milyar tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 8,98 milyar pada tahun 2015. Laju pertumbuhan PDRB adh konstan berfluktuasi antara 1,47 - 5,92 persen selama periode tersebut.

Tabel 9 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2010-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	8.088,54	8.717,72	9.705,36	10.846,42	11.658,51
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	7.641,36	7.753,46	8.212,68	8.626,21	8.976,24
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	3,81	1,47	5,92	5,04	4,06

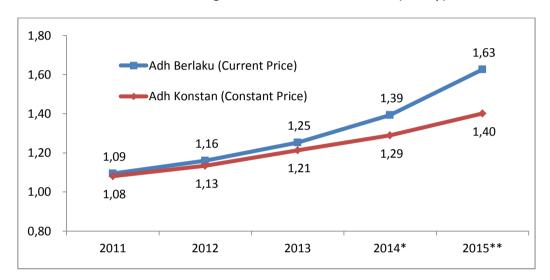
^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

^{**} Angka sangat sementara

f. Konstruksi

Kontruksi menempati urutan ketiga kategori penyumbang PDRB Lombok Timur setelah kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori Perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2014 niali tambah yang dihasilkan kategori konstruksi sekitar Rp. 1,39 triliun atau setara dengan 10,90 persen PDRB Lombok Timur. Tahun 2015 meningkat menjadi Rp 1,63 triliun atau sekitar 11,42 persen total PDRB.



Grafik 6 PDRB Kategori Konstruksi Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

PDRB adh konstan kategori Konstruksi tahun 2015 sekitar Rp. 1,40 triliun mengalami peningkatan 8,70 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 1,29 triliun. Pada periode 2011-2015 laju pertumbuhan kategori PDRB kategori konstruksi berkisar antara 4,93 persen sampai 8,70 persen.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Karakteristik perdagangan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen memungkinkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkembang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2011 nilai tambah kategori ini sekitar Rp. 1,42 triliun atau sekitar 14,28 persen PDRB yang dihasilkan di Kabupaten Lombok Timur, tahun 2015 naik menjadi Rp. 2,26 triliun setara dengan

15,87 persen PDRB Lombok Timur. Sekitar 84,70 persen dari seluruh nilai tambah kategori ini dihasilkan dari sub kategori Perdagangan Besar dan Eceran, sementara 15,30 persen sisanya dari subkategori Perdagangan mobil, Sepeda motor dan reparasinya.

Tabel 10 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	1.416.995	1.588.177	1.752.724	2.018.077	2.259.455
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	14,28	14,83	15,18	15,80	15,87
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	1.355.191	1.470.373	1.592.702	1.714.907	1.824.014
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	9,34	8,50	8,32	7,67	6,36

^{*} Angka sementara

Jika dinilai menggunakan harga konstan, PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2015 sebesar Rp. Rp. 1,82 triliun mengalami peningkatan sekitar 6,36 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 1,71 triliun. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun 2011-2015 rata-rata diatas 6 persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan kategori ini mencapai 9,34 persen, tahun 2012 sekitar 8,50 persen tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 8,32 dan 7,67 persen.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 subkategori, yaitu subkategori Angkutan Rel, subkategori Angkutan Darat, subkategori Angkutan Laut, subkategori Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, subkategori Angkutan Udara, serta subkategori Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Dari 6 subkategori tersebut, kegiatan dua subkategori (Angkutan Rel dan Angkutan Udara) tidak ada di Lombok Timur.

^{**} Angka sangat sementara

Pada tahun 2014 PDRB kategori ini sekitar Rp. 567,75 milyar atau sekitar 4,44 persen PDRB Lombok Timur, tahun 2015 kontribusi mengalami sedikit penurunan menjadi 4,41 persen namun secara absolute PDRB kategori ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 628,36 milyar. Subkategori Angkutan Darat memberikan kontribusi paling besar, pada tahun 2015 subkategori ini memiliki share sebesar 64 persen, berikutnya adalah subkategori Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan dengan share 32,60 persen dan Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan sebesar 2,81 persen.

Pada tahun 2014 PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan adh konstan sebesar Rp. 502,85 milyar, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,10 persen menjadi Rp. 528,48 milyar. Laju pertumbuhan tertinggi pada pada subkategori angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (6,40 persen) dan terendah pada subkategori Angkutan laut (3,64 persen).

Tabel 11 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	428.348,40	460.529,12	494.924,82	567.754,98	628.355,03
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	4,32	4,30	4,29	4,44	4,41
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	421.864,43	446.521,91	470.561,98	502.850,52	528.488,50
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	5,76	5,84	5,38	6,86	5,10

^{*} Angka sementara

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kontribusi kategori Penyedian Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kabupaten Lombok Timur kurang dari satu persen. Pada tahun 2011 PDRB adh berlaku kategori Penyedian Akomodasi dan Makan Minum sekitar Rp. 83,04 milyar (0,84 persen dari total PDRB), tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 139,76 milyar (0,98 persen). Sebagian besar nilai tambah kategori ini dihasilkan dari subkategori penyediaan makan dan minum (91,88 persen) dan sisanya dari subkategori penyediaan akomodasi.

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 12 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	83.038,13	91.083,02	106.706,58	124.864,05	139.762,27
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	0,84	0,85	0,92	0,98	0,98
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	79.388,58	84.082,04	90.322,83	96.278,25	102.443,59
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	6,26	5,91	7,42	6,59	6,40

^{*} Angka sementara

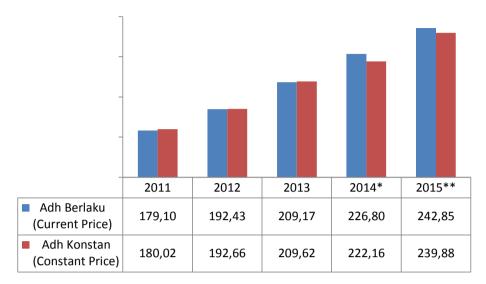
Pada tahun 2014 PDRB kategori Penyediaan akomodasi dan makan minum adh konstan sebesar Rp. 96,28 milyar, tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 6,40 persen menjadi Rp. 102,44 milyar. Pada periode 2011-2015 kategori ini mempunyai laju pertumbuhan diatas 6 persen, dengan laju pertumbuhan tertinggi tahun 2013 sebesar 7,42 persen.

j. Informasi dan Komunikasi

Kontribusi kategori Informasi dan Komunikasi terhadap perekonomian di Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2011-2015 berkisar antara 1,71 - 1,81 persen. Pada tahun 2011 PDRB adh berlaku kategori Informasi dan komunikasi sebesar Rp. 179,10 milyar tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 242,85 milyar, sedangkan jika dinilai menggunakan harga konstan PDRB kategori informasi dan komunikasi tahun 2015 sebesar Rp. 239,88 milyar mengalami pertumbuhan sebesar 7,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 222,16 milyar. Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan kategori ini diatas 7 persen kecuali tahun 2014 (5,98 persen).

^{**} Angka sangat sementara

Grafik 7 PDRB Kategori Informasi & Komunikasi Tahun 2011-2015 (Juta Rp)



^{*} Angka sementara

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Pada tahun 2011-2015 nilai tambah kategori Jasa keuangan dan asuransi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari Rp. 191,95 milyar tahun 2011 menjadi Rp. 339,66 milyar di tahun 2015. Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas bagi nilai tambah pada ini. Selama tahun 2010-2015, kontribusi subkategori jasa perantara keuangan lebih dari 60 persen. Penyumbang terbesar berikutnya adalah subkategori Jasa keuangan lainnya pada kisaran di atas 20 persen, Subkategori Jasa Asuransi dan Dana Pensiun dengan sumbangan sekitar 13 persen, sedangkan subkategori Jasa Penunjang Keuangan memiliki kontribusi kurang dari 1 persen terhadap seluruh nilai tambah kategori ini.

Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2015. PDRB adh konstan kategori ini sekitar Rp. 272,21 milyar meningkat 9,79 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 247,93 milyar. Dalam lima tahun terakhir kategori Jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan rata-rata 10,79 persen.

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 13 PDRB, Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Tahun 2011- 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	83.038,13	91.083,02	106.706,58	124.864,05	139.762,27
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	0,84	0,85	0,92	0,98	0,98
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	79.388,58	84.082,04	90.322,83	96.278,25	102.443,59
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	6,26	5,91	7,42	6,59	6,40

^{*} Angka sementara

I. Real Estat

PDRB adh berlaku kategori Real estate tahun 2011 sebesar Rp. 327,06 milyar tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 512,54 milyar. Selama periode 2011-2015 kontribusi kategori ini relatif stabil dengan share sekitar 3 persen. Jika dinilai menggunakan harga konstan, PDRB kategori real estate tahun 2015 sebesar Rp. 389,79 milyar meningkat 6,26 persen dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 366,83 milyar. Laju pertumbuhan tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,51 persen. Selama periode 2011-2013 laju pertumbuhan PDRB kategori ini selalu diatas 6 persen.

Tabel 14 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Real Estate (Persen)
Tahun 2010-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	327.055,25	368.194,75	413.089,19	467.038,49	512.538,52
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	3,30	3,44	3,58	3,66	3,60
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	305.823,79	325.840,51	347.682,97	366.833,40	389.789,89
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	6,28	6,55	6,70	5,51	6,26

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

^{**} Angka sangat sementara

m. Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, nilai tambah yang dihasilkan ketegori ini sekitar 0,11 persen dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan di Lombok Timur. Demikian juga dengan laju pertumbuhan, pada tahun 2015 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 4,87 persen, lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan periode 2011-2014 yang berada diatas 6 persen.

Tabel 15 GDRP, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	10.451,36	11.511,48	12.654,04	14.338,69	15.748,88
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	10.272,05	11.048,16	11.772,10	12.532,89	13.143,61
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	6,92	7,56	6,55	6,46	4,87

^{*} Angka sementara

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

Sejalan dengan peningkatan belanja daerah/Realisasi APBD, PDRB ketegori mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 nilai tambah yang dihasilkan sebesar Rp. 726,79 milyar, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1,12 triliun. Selama tahun 2011-2015 share kategori Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial

^{**} Angka sangat sementara

wajib relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, pada tahun 2011 kontribusi kategori ini sekitar 7,01 persen, tahun 2015 meningkat menjadi 7,71 persen.

Jika dinilai menggunakan harga konstan nilai tambah yang dihasilkan tahun 2014 sekitar Rp. 749,42 milyar, tahun 2015 naik menjadi Rp. 776,90 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen. Laju pertumbuhan PDRB Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan wajib Sosial tahun 2011-2014 selalu positif walaupun dibawah 6 persen. Tahun 2011 laju pertumbuhan kategori ini sebesar 3,99 persen, tahun 2012 turun menjadi 1,83 persen, tahun 2013-2014 kembali mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,92 persen dan 5,93 persen.

Tabel 16 PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	726.794,8	787.704,0	865.322,7	1.011.400,7	1.125.541,6
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	7,33	7,36	7,49	7,92	7,90
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	662.171,6	674.278,3	707.449,9	749.420,1	776.897,3
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	3,99	1,83	4,92	5,93	3,67

^{*} Angka sementara

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2015 jasa pendidikan menyumbang 5,40 persen PDRB Kabupaten Lombok Timur atau sekitar Rp. 769,40 milyar. Kontribusi tahun 2015 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 5,40 persen atau setara dengan nilai tambah sebesar Rp. 685,67 milyar. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, nilai tambah kategori ini tahun 2014 sebesar Rp. 566,32 milyar, tahun 2015 naik menjadi Rp. 598,96 milyar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 persen. Laju pertumbuhan PDRB kategori Jasa pendidikan tahun 2011-2014 berkisar antara 3,89 sampai 7,99 persen.

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 17 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Pendidikan (Persen) Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	506.390,2	556.219,6	626.752,3	685.665,2	769.399,9
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku (%)	5,10	5,19	5,43	5,37	5,40
PDRB adh Konstan (Juta Rp)	472.956,2	491.368,2	530.607,8	566.318,9	598.975,4
Laju Pertumbuhan adh Konstan (%)	7,46	3,89	7,99	6,73	5,77

^{*} Angka sementara

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2015, kontribusinya kategori ini terhadap Pembentukan nilai tambah di Kabupaten Lombok Timur sebesar 2,13 persen dengan laju pertumbuhan adh konstan sebesar 6,35 persen. Selama tahun 2010-2015 kontribusi kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial relatif stabil antara 2,07 - 2,13 persen, sedangkan laju pertumbuhannya berada pada kisaran 3,52 persen sampai dengan 7,89 persen.

Tabel 18 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Persen) Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku	2,12	2,12	2,07	2,12	2,13
Laju Pertumbuhan adh Konstan	7,57	3,52	7,89	6,43	6,35

^{*} Angka sementara

q. Jasa lainnya

Kontribusi Kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Timur relatif kecil. Pada tahun 2015, kontribusinya kategori ini terhadap Pembentukan nilai tambah di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,99 persen dengan laju pertumbuhan

^{**} Angka sangat sementara

^{**} Angka sangat sementara

adh konstan sebesar 6,07 persen. Selama tahun 2010-2015 kontribusi kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial relatif stabil antara 1,99 - 2,02 persen, sedangkan laju pertumbuhannya berada pada kisaran 4,17 persen sampai dengan 7,63 persen..

Tabel 19 Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Lainnya (Persen) Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kontribusi Thd PDRB adh Berlaku	2,01	1,99	2,01	1,99	1,99
Laju Pertumbuhan adh Konstan	7,63	4,17	7,33	5,13	6,07

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

V. PDRB LOMBOK TIMUR MENURUT PENGELUARAN

Pemanfaatan nilai tambah yang timbulkan dari berbagai aktifitas ekonomi dapat dilihat dari PDRB menurut pengeluaran. Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Lombok Timur menurut pengeluaran adh berlaku sebesar Rp. 14,24 triliun, meningkat sekitar Rp. 1,46 triliun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp. 12,77 triliun. Dalam lima tahun terakhir rata-rata peningkatan PDRB penggunaan Lombok Timur adh berlaku sekitar Rp. 1,08 triliun.

Tabel 20. PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2011-2015

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	8.531.741,5	9.410.447,1	10.070.385,1	10.967.265,0	11.717.258,3
Konsumsi LNPRT	253.538,1	280.812,8	326.911,4	395.557,4	431.949,1
Konsumsi Pemerintah	1.636.006,8	1.747.480,8	1.930.337,4	2.584.556,9	2.951.378,5
РМТВ	3.429.174,7	3.853.784,0	4.133.068,2	4.533.857,2	5.220.079,1
Perubahan Inventori	114.786,6	121.317,3	1.424,1	31.366,3	13.432,6
Ekspor	1.810.877,4	1.977.444,9	1.769.579,8	1.932.880,5	1.975.520,5
Impor	5.856.236,0	6.684.301,7	6.683.931,4	7.670.918,4	8.069.068,7
Total PDRB	9.919.889,2	10.706.985,2	11.547.774,6	12.774.564,8	14.240.549,5

^{*)} Angka Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Lombok Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah). Permintaan akhir ketiga institusi tersebut melebihi kemampuan produksi domestik sehingga sebagian penyedian diperoleh melalui impor baik impor luar negeri dan terutama impor antar daerah. Pada tahun 2015 proporsi masing-masing pengeluaran akhir terhadap PDRB pengeluaran sebesar 82,28 persen (untuk konsumsi Rumah tangga), sekitar 3,03 persen (untuk konsumsi LNPRT) dan 20,73 persen (untuk konsumsi Pemerintah). Selain untuk konsumsi akhir sekitar 36,75 persen dari total PDRB

^{**)} Angka Sangat Sementara

pengeluaran Lombok Timur tahun 2015 digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori, dengan komposisi masing-masing 36,66 persen PMTB dan 0,09 persen perubahan inventori.

Di sisi lain, perdagangan regional dan internasional yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan posisi defisit, dimana nilai impor cenderung lebih tinggi dari nilai ekspor. Share komponen ekspor terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur tahun 2011 - 2015 berkisar antara 13 - 18 persen, sedangkan komposisi impor mencapai 56 - 62 persen. Hal ini sekaligus menjadi gambaran ketergantungan konsumsi akhir yang cukup tinggi terhadap impor.

Tabel 21. Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2011-2015

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	86,01	87,89	87,21	85,85	82,28
Konsumsi LNPRT	2,56	2,62	2,83	3,10	3,03
Konsumsi Pemerintah	16,49	16,32	16,72	20,23	20,73
РМТВ	34,57	35,99	35,79	35,49	36,66
Perubahan Inventori	1,16	1,13	0,01	0,25	0,09
Ekspor	18,26	18,47	15,32	15,13	13,87
Impor	59,04	62,43	57,88	60,05	56,66
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

Sebagai bagian integral dari perekonomian nasional maupun regional, perkembangan perekonomian Lombok Timur tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal (seperti stuktur perdagangan global, perubahan teknologi dll) dan faktor internal (perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, ketersediaan suplay domestik dll). Pada tahun 2011 - 2015 struktur permintaan akhir Kabupaten Lombok Timur terjadi perubahan namun tidak signifikan. Komponen Pengeluaran Rumah tangga masih memiliki proporsi paling besar dengan kecendrungan menurun selama periode tersebut. Selain pengeluaran konsumsi Rumah

^{**)} Angka Sangat Sementara

tangga komponen Ekspor juga mengalami penurunan share dari 18,26 persen tahun 2011 menjadi 13,87 persen pada tahun 2015. Disisi lainnya share komponen konsumsi pemerintah dan PMTB mengalami peningkatan, sementara share konsumsi LNPRT dan perubahan inventori relatife tetap selama peride 2011 - 2015.

Tabel 22. PDRB adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2011-2015

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	8.275.862,8	8.695.527,9	8.989.481,8	9.430.497,4	9.831.041,3
Konsumsi LNPRT	249.181,7	266.015,7	290.755,2	319.908,2	331.664,1
Konsumsi Pemerintah	1.543.572,8	1.588.126,6	1.684.941,4	1.825.911,8	1.876.860,2
PMTB	3.123.373,9	3.346.704,5	3.453.892,3	3.553.048,4	3.885.296,0
Perubahan Inventori	109.852,9	109.978,4	1.121,8	17.809,9	10.448,6
Ekspor	1.737.510,2	1.810.485,8	1.662.389,7	1.219.860,3	1.166.537,1
Impor	5.389.698,7	5.643.302,4	5.348.019,1	5.118.391,2	5.188.296,2
Total PDRB	9.649.655,6	10.173.536,5	10.734.563,2	11.248.644,7	11.913.551,1

^{*)} Angka Sementara

Selain atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, diperoleh gambaran tentang perubahan PDRB secara volume (kuantitas) tanpa pengaruh perubahan harga berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Jika dinilai menggunakan harga konstan 2010, PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur tahun 2011 - 2015 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh konstan sebesar Rp. 9,64 triliun, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 11,91 triliun. Selama periode 2011-2015 laju pertumbuhan PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh konstan antara 4,93 – 5,91 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Gambaran laju pertumbuhan PDRB pengeluaran kabupaten Lombok Timur adh konstan 2010 seperti tabel 23.

^{**)} Angka Sangat Sementara

Tabel 23. Laju Pertumbuhan PDRB adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	5,74	5,07	3,38	4,91	4,25
Konsumsi LNPRT	2,84	6,76	9,30	10,03	3,67
Konsumsi Pemerintah	4,96	2,89	6,10	8,37	2,79
PMTB	4,24	7,15	3,20	2,87	9,35
Perubahan Inventori	(0,13)	0,11	(98,98)	1.487,65	(41,33)
Ekspor	0,95	4,20	(8,18)	(26,62)	(4,37)
Impor	2,00	4,71	(5,23)	(4,29)	1,37
Total PDRB	6,23	5,43	5,51	4,79	5,91

^{*)} Angka Sementara

5.1. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB Lombok Timur menurut pengeluaran. Hal ini mengindikasikan sebagian besar produk domestik dan impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Melimpahnya penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik disamping kenaikan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga, mengakibatkan konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan) dalam kurun waktu 2011 - 2015.

Tabel 24. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB <i>(Miliar Rp)</i>	8.531,74	9.410,45	10.070,39	10.967,26	11.717,26
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	8.275,86	8.695,53	8.989,48	9.430,50	9.831,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	86,01	87,89	87,21	85,85	82,28
Pertumbuhan adhk (%)	5,74	5,07	3,38	4,91	4,25

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pengeluaran pada periode tahun 2011 - 2015 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 87,89 persen dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 82,28 persen. Sementara itu adh Konstan 2010, komponen konsumsi rumah tangga mengalami ratarata mengalami pertumbuhan sekitar 4,67 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 5,47 persen.

Tabel 25. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 - 2015 (Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	48,29	47,04	45,19	44,87	44,35
Pakaian dan Alas Kaki	3,31	3,29	3,23	3,15	3,20
Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Ruta	17,06	17,14	18,07	18,74	18,85
Kesehatan & Pendidikan	9,70	10,03	10,00	10,10	10,26
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,20	13,38	13,94	13,70	13,74
Hotel & Restoran	3,39	3,62	3,82	3,86	3,90
Lainnya	5,04	5,50	5,75	5,58	5,70
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} Angka Sementara

Secara umum struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga di Lombok Timur hampir berimbang antara pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Pada periode 2011-2014 proporsi pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran 44 sampai dengan 48 persen dengan pola yang semakin mengecil setiap tahun. Konsumsi non makanan yang paling besar adalah untuk perumahan, perkakas perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dengan share antara 17-18 persen dari seluruh konsumsi rumah tangga.

^{**)} Angka Sangat Sementara

5.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Pengertian lembaga Non Profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. LNPRT berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga pada tingkat harga dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku). Share konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur masih kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Pada tahun 2011-2015 proporsi Konsumsi Akhir LNPRT berada pada kisaran 2,56 sampai dengan 3,10 persen. Sedangkan laju pertumbuhan adh Konstan pada periode 2011-2014 sekitar 2,84 sampai dengan 10,03 persen. Laju pertumbuhan LNPRT yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014, sebagai dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Tabel 26. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	253.538,1	280.812,8	326.911,4	395.557,4	431.949,1
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	249.181,7	266.015,7	290.755,2	319.908,2	331.664,1
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,56	2,62	2,83	3,10	3,03
Laju Pertumbuhan (% ADHK)	2,84	6,76	9,30	10,03	3,67

^{*)} Angka Sementara

5.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Secara absolut, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, baik adh berlaku maupun adh konstan 2010. Pada tahun 2011 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar Rp 1,64 triliun, meningkat hingga mencapai Rp. 2,95 triliun pada tahun 2015. Demikian halnya dengan konsumsi

^{**)} Angka Sangat Sementara

pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan antara 2,84 sampai dengan 10,03 persen pada periode 2011-2015. Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 16,49 persen ditahun 2011 hingga mencapai 20,73 persen pada tahun 2015.

Tabel 27. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Juta Rp)	1.636.006,8	1.747.480,8	1.930.337,4	2.584.556,9	2.951.378,5
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1.543.572,8	1.588.126,6	1.684.941,4	1.825.911,8	1.876.860,2
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	16,49	16,32	16,72	20,23	20,73
Konsumsi Pemerintah					
a. Kolektif (Juta <i>Rp</i>)	869.460,1	918.550,2	1.026.350,1	1.324.458,7	1.469.379,7
(%)	53,15	52,56	53,17	51,25	49,79
b. Individu (<i>Juta Rp</i>)	766.546,7	828.930,6	903.987,3	1.260.098,2	1.481.998,8
(%)	46,85	47,44	46,83	48,75	50,21
Pertumbuhan (%)					
a. Kolektif	6,26	2,52	7,24	2,95	2,2
b. Individu	3,47	3,32	4,76	14,85	3,42
Total Konsumsi Pemerintah	2,84	6,76	9,3	10,03	3,67

^{*)} Angka Sementara

5.4. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

^{**)} Angka Sangat Sementara

PMTB merupakan salah satu komponen PDRB pengeluaran yang mengalami perkembangan signifikan baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Selama periode tahun 2011-2015 komponen PMTB adh konstan mengalami pertumbuhan antara 2,87 sampai 9,35 persen dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi tahun 2015. Sejalan dengan adh konstan, komponen PMTB adh berlaku juga mengalami peningkatan rata-rata Rp. 447,73 milyar setiap tahunnya. Peningkatan yang konsisten tersebut berdampak pada share komponen ini terhadap total PDRB pengeluaran yang mengalami peningkatan sekitar 2 persen dari 34,57 persen pada tahun 2011 menjadi 36,66 persen di tahun 2015. Sub komponen bangunan memiliki proporsi terbesar dalam pembentukan modal PMTB. Pada tahun 2011-2015 Sub komponen bangunan menyumbang 78,19 sampai 81,95 persen terhadap total PMTB. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB lainnya

Tabel 28. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011—2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
РМТВ					
a. ADHB (Juta Rp)	3.429.174,7	3.853.784,0	4.133.068,2	4.533.857,2	5.220.079,1
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	3.123.373,9	3.346.704,5	3.453.892,3	3.553.048,4	3.885.296,0
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	34,57	35,99	35,79	35,49	36,66
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Juta Rp)	2.810.065,0	3.076.475,6	3.270.035,9	3.545.190,3	4.087.395,8
(%)	81,95	79,83	79,12	78,19	78,30
b. Non Bangunan (Juta Rp)	619.109,6	777.308,4	863.032,3	988.666,9	1.132.683,3
(%)	18,05	20,17	20,88	21,81	21,70
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	3,35	3,97	3,03	9,89	3,35
b. Non Banguan	23,02	0,51	2,28	7,39	23,02
Total PMTB	7,15	3,2	2,87	9,35	7,15

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

5.5. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 29. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 - 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB <i>(Juta Rp)</i>	114.786,6	121.317,3	1.424,1	31.366,3	13.432,6
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	109.852,9	109.978,4	1.121,8	17.809,9	10.448,6
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,16	1,13	0,01	0,25	0,09

^{*)} Angka Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Pada Tahun 2015 perubahan inventori pada PDRB pengeluaran sebesar Rp. 13,43 miliar. Selama periode 2011-2015 proporsi perubahan inventori terhadap PDRB pengeluaran sekitar 0,01 sampai 1,16 persen.

^{**)} Angka Sangat Sementara

5.6. PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor adalah pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah, wisatawan asing dan sebagainya. Untuk kabupaten Lombok Timur, transaksi ekspor antar negara umumnya berasal dari wisatawan asing yang berkunjung dan mengkonsumsi barang dan jasa secara langsung (direct purchase) di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 30. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur,
Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	19.711,57	22.425,92	24.735,13	34.621,81	37.752,71
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	18.613,01	19.948,22	20.896,61	26.725,39	27.673,18
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,20	0,21	0,21	0,27	0,27
Struktur Ekspor					
a. Barang (Juta Rp)	8.821,88	9.697,52	10.677,36	13.024,54	14.766,65
(%)	44,75	43,24	43,17	37,62	39,11
b. Jasa <i>(Juta Rp)</i>	10.889,68	12.728,40	14.057,77	21.597,27	22.986,06
(%)	55,25	56,76	56,83	62,38	60,89
Pertumbuhan (%)					
a. Barang	(3,33)	4,41	4,55	5,83	3,58
b. Jasa	(0,30)	9,38	4,91	44,66	3,53
Total Ekspor	(1,67)	7,17	4,75	27,89	3,55

^{*)} Angka Sementara

Komponen ekspor luar negeri PDRB pengeluaran Kabupaten Lombok Timur adh berlaku tahun 2015 sekitar Rp. 37,75 milyar mengalami peningkatan dibandingkan

^{**)} Angka Sangat Sementara

dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 34,62 milyar. Selama periode 2011-2015 share komponen ekspor luar negeri terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur hanya 0,20 sampai 0,27 persen. Share yang relatif kecil disebabkan ekspor luar negeri yang tercatat hanya dari konsumsi langsung oleh wisatawan sedangkan barang-barang komoditas ekspor biasanya di kirim ke Bali atau Jawa (yang memiliki Bandara dan pelabuhan internasional) terhitung sebagai perdagangan antar daerah.

Komposisi komponen ekspor luar negeri cukup berimbang antara barang dan jasa dengan kecendrungan ekspor jasa sedikit lebih besar. Pada tahun 2015 sekitar 60,89 persen ekpsor luar negeri adalah ekspor jasa (akomodasi dan transportasi) dan 39,11 persen sisanya berupa barang baik makanan maupun non makanan. Sedangkan pertumbuhan riil komponen ekspor luar negeri periode tahun 2011-2015 selalu positif kecuali tahun 2011 (mengalami pertumbuhan negatif 3,33 persen). Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB pengeluaran adh konstan komponen ekspor luar negeri mencapai 3,55 persen.

5.7. PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Lombok Timur. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Transaksi impor memperlihatkan tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Mengingat Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki bandara atau pelabuhan internasionel sebagai pintu masuk impor, maka komponen impor luar negeri di Kabupaten Lombok Timur umumnya berasal dari konsumsi langsung (*direct purchase*) residen Lombok Timur (seperti Jemaah haji dan wisatawan) terhadap barang maupun jasa yang dilakukan di luar negeri.

Tabel 31. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur, Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	334.766,3	338.398,0	381.276,6	383.891,3	506.449,1
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	324.309,5	307.737,5	323.363,6	307.914,2	383.096,8
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,37	3,16	3,30	3,01	3,56
Struktur Impor (ADHB)					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	263.970,4	258.703,5	284.302,4	250.058,0	315.177,2
(%)	78,85	76,45	74,57	65,14	62,23
b. Jasa <i>(Miliar Rp)</i>	70.795,9	79.694,5	96.974,2	133.833,2	191.271,9
(%)	21,15	23,55	25,43	34,86	37,77
Pertumbuhan (%)					
a. Barang	-9,84	-5,79	2,27	-10,27	19,24
b. Jasa	-7,79	-2,70	14,75	12,10	37,13
Total Impor	-9,40	-5,11	5,08	-4,78	24,42

^{*)} Angka Sementara

Komponen impor Luar negeri PDRB pengeluaran adh berlaku Kabupaten Lombok Timur tahun 2011 sekitar Rp. 334,77 milyar, setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2012 komponen ini mengalami peningkatan selama periode 2013-2015 hingga mencapai Rp. 506,45 milyar pada tahun 2015. Share komponen impor luar negeri terhadap PDRB pengeluaran Lombok Timur sekitar 3,01 sampai dengan 3,56 persen dengan kecendrungan menurun. Pada periode 2011-2013 laju pertumbuhan komponen impor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif kecuali tahun 2013 dan 2015 yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,08 persen dan 24,42 persen. Menurut komposisinya, sebagian besar impor luar negeri berbentuk barang (rata-rata sekitar 62,23 persen) sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

5.8. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar

^{**)} Angka Sangat Sementara

negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daserah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode cross-hauling diawali dengan metode commodity balance. Metode commodity balance adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (balancing item) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.008.129,8	3.183.414,1	3.356.841,0	3.566.988,5	3.972.651,8
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	2.485.236,6	2.641.467,8	2.794.102,4	2.934.411,2	3.273.293,0
	a. Tanaman Pangan	1.113.445,4	1.206.805,7	1.301.716,6	1.325.919,0	1.513.763,8
	b.Tanaman Hortikultura	590.206,3	607.457,2	635.177,8	690.595,8	766.674,4
	c.Tanaman Perkebunan	370.807,4	401.073,3	405.757,6	429.846,4	454.135,5
	d.Peternakan	313.285,2	325.642,1	346.664,3	378.037,6	418.981,8
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	97.492,3	100.489,5	104.786,2	110.012,4	119.737,4
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.320,8	2.413,6	2.518,7	2.593,0	2.799,1
	3. Perikanan	520.572,4	539.532,7	560.219,9	629.984,3	696.559,7
В	Pertambangan dan Penggalian	555.744,2	605.248,0	656.952,1	733.258,6	840.644,9
C	Industri Pengolahan	967.654,4	1.021.740,8	1.041.763,3	1.121.822,7	1.159.903,9
D	Pengadaan Listrik & Gas	5.533,7	6.296,9	5.564,8	7.804,3	8.971,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.088,5	8.717,7	9.705,4	10.846,4	11.658,5
F	Konstruksi	1.094.791,6	1.160.019,7	1.253.401,7	1.393.028,7	1.626.151,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.416.994,7	1.588.177,4	1.752.723,9	2.018.077,2	2.259.454,8
	1.Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	226.128,6	256.765,2	281.958,6	312.494,4	345.626,7
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.190.866,2	1.331.412,2	1.470.765,2	1.705.582,8	1.913.828,1
Н	Transportasi dan Pergudangan	428.348,4	460.529,1	494.924,8	567.755,0	628.355,0
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	298.505,6	314.345,3	333.814,9	369.223,1	402.157,0
	3.Angkutan Laut	2.576,7	2.767,9	2.906,6	3.304,2	3.675,2
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	115.892,2	130.848,5	144.080,9	179.785,6	204.853,0
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	11.373,9	12.567,4	14.122,5	15.442,2	17.669,8
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83.038,1	91.083,0	106.706,6	124.864,1	139.762,3
	1.Penyediaan Akomodasi	7.093,7	7.956,3	9.297,7	11.590,4	12.983,2
	2.Penyediaan Makan Minum	75.944,5	83.126,7	97.408,9	113.273,6	126.779,0
J	Informasi dan Komunikasi	179.104,1	192.429,4	209.168,1	226.795,7	242.854,8

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	191.950,3	231.413,4	265.065,5	299.001,0	339.656,6
	1. Jasa Perantara Keuangan	126.136,2	159.968,3	189.893,1	215.043,2	248.169,8
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	9.429,5	9.840,3	10.619,2	11.411,2	12.458,9
	3. Jasa Keuangan Lainnya	56.359,8	61.578,0	64.523,1	72.512,7	78.990,7
	4. Jasa Penunjang Keuangan	24,9	26,8	30,2	34,0	37,1
L	Real Estat	327.055,2	368.194,7	413.089,2	467.038,5	512.538,5
M,N	Jasa Perusahaan	10.451,4	11.511,5	12.654,0	14.338,7	15.748,9
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726.794,8	787.704,0	865.322,8	1.011.400,7	1.125.541,6
P	Jasa Pendidikan	506.390,2	556.219,6	626.752,3	685.665,3	769.400,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210.025,0	221.575,0	244.507,4	272.104,8	303.280,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	199.794,8	212.710,9	232.631,7	253.774,7	283.974,3
	PDRB	9.919.889,2	10.706.985,2	11.547.774,6	12.774.564,8	14.240.549,5

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.971.560,1	3.104.214,2	3.213.182,8	3.276.889,7	3.447.146,4
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.451.471,0	2.567.873,3	2.660.867,1	2.692.899,9	2.836.284,1
	a. Tanaman Pangan	1.089.704,3	1.159.720,6	1.226.969,7	1.223.194,4	1.327.777,0
	b.Tanaman Hortikultura	586.794,3	598.749,3	603.899,1	621.168,9	636.814,9
	c.Tanaman Perkebunan	366.987,3	390.130,3	393.116,2	399.832,0	398.170,4
	d.Peternakan	311.438,9	320.335,6	335.577,7	346.294,6	364.148,3
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	96.546,2	98.937,6	101.304,4	102.410,1	109.373,5
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	2.307,8	2.380,0	2.438,4	2.478,2	2.537,5
	3. Perikanan	517.781,4	533.960,9	549.877,2	581.511,5	608.324,7
В	Pertambangan dan Penggalian	551.200,3	591.959,5	634.681,1	673.784,0	733.283,7
c	Industri Pengolahan	955.549,7	1.004.265,6	1.016.283,1	1.033.332,7	1.059.592,1
D	Pengadaan Listrik & Gas	6.117,3	6.813,6	7.125,6	9.908,0	9.991,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.641,4	7.753,5	8.212,7	8.626,2	8.976,2
F	Konstruksi	1.081.394,7	1.134.691,7	1.213.272,0	1.289.169,2	1.401.336,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.355.190,9	1.470.373,0	1.592.701,9	1.714.906,9	1.824.013,7
	1.Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	222.823,5	239.590,4	256.229,5	272.611,3	289.450,6
	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.132.367,3	1.230.782,6	1.336.472,3	1.442.295,5	1.534.563,1
Н	Transportasi dan Pergudangan	421.864,4	446.521,9	470.562,0	502.850,5	528.488,5
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	294.240,3	305.854,7	319.801,4	334.635,3	349.783,8
	3.Angkutan Laut	2.530,8	2.684,6	2.752,7	2.947,4	3.054,5
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	113.900,6	126.142,4	135.474,1	152.103,4	161.834,6
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	11.192,7	11.840,2	12.533,7	13.164,5	13.815,5
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.388,6	84.082,0	90.322,8	96.278,3	102.443,6
	1.Penyediaan Akomodasi	6.669,1	6.936,3	7.427,2	7.965,4	8.318,1
	2.Penyediaan Makan Minum	72.719,5	77.145,8	82.895,7	88.312,8	94.125,5
J	Informasi dan Komunikasi	180.024,3	192.659,1	209.619,6	222.155,2	239.878,1

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	184.420,8	208.085,7	229.544,8	247.931,0	272.208,5
	1. Jasa Perantara Keuangan	119.101,0	138.371,1	156.936,7	171.119,6	191.113,7
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	9.347,8	9.612,9	10.206,0	10.590,7	11.162,3
	3. Jasa Keuangan Lainnya	55.948,0	60.076,4	62.375,6	66.192,6	69.902,8
	4. Jasa Penunjang Keuangan	24,0	25,3	26,5	28,1	29,7
L	Real Estat	305.823,8	325.840,5	347.683,0	366.833,4	389.789,9
M,N	Jasa Perusahaan	10.272,0	11.048,2	11.772,1	12.532,9	13.143,6
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	662.171,6	674.278,3	707.449,9	749.420,1	776.897,3
P	Jasa Pendidikan	472.956,2	491.368,1	530.607,8	566.319,0	598.975,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.754,9	214.028,6	230.915,5	245.755,8	261.363,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	197.324,5	205.552,9	220.626,7	231.951,9	246.022,3
	PDRB	9.649.655,6	10.173.536,5	10.734.563,2	11.248.644,7	11.913.551,1

^{*} Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Kababupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,32	29,73	29,07	27,92	27,90
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	25,05	24,67	24,20	22,97	22,99
	a. Tanaman Pangan	11,22	11,27	11,27	10,38	10,63
	b.Tanaman Hortikultura	5,95	5,67	5,50	5,41	5,38
	c.Tanaman Perkebunan	3,74	3,75	3,51	3,36	3,19
	d.Peternakan	3,16	3,04	3,00	2,96	2,94
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	0,98	0,94	0,91	0,86	0,84
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3. Perikanan	5,25	5,04	4,85	4,93	4,89
В	Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,65	5,69	5,74	5,90
С	Industri Pengolahan	9,75	9,54	9,02	8,78	8,15
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	11,04	10,83	10,85	10,90	11,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,28	14,83	15,18	15,80	15,87
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	2,28	2,40	2,44	2,45	2,43
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	12,00	12,43	12,74	13,35	13,44
н	Transportasi dan Pergudangan	4,32	4,30	4,29	4,44	4,41
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	3,01	2,94	2,89	2,89	2,82
	3.Angkutan Laut	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	1,17	1,22	1,25	1,41	1,44
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,85	0,92	0,98	0,98
	1.Penyediaan Akomodasi	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
	2.Penyediaan Makan Minum	0,77	0,78	0,84	0,89	0,89
J	Informasi dan Komunikasi	1,81	1,80	1,81	1,78	1,71

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,94	2,16	2,30	2,34	2,39
	1. Jasa Perantara Keuangan	1,27	1,49	1,64	1,68	1,74
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,57	0,58	0,56	0,57	0,55
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estat	3,30	3,44	3,58	3,66	3,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,33	7,36	7,49	7,92	7,90
P	Jasa Pendidikan	5,10	5,19	5,43	5,37	5,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,12	2,07	2,12	2,13	2,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,01	1,99	2,01	1,99	1,99
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*} Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,79	30,51	29,93	29,13	28,93
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	25,40	25,24	24,79	23,94	23,81
	a. Tanaman Pangan	11,29	11,40	11,43	10,87	11,15
	b.Tanaman Hortikultura	6,08	5,89	5,63	5,52	5,35
	c.Tanaman Perkebunan	3,80	3,83	3,66	3,55	3,34
	d.Peternakan	3,23	3,15	3,13	3,08	3,06
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	1,00	0,97	0,94	0,91	0,92
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	3. Perikanan	5,37	5,25	5,12	5,17	5,11
В	Pertambangan dan Penggalian	5,71	5,82	5,91	5,99	6,16
С	Industri Pengolahan	9,90	9,87	9,47	9,19	8,89
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,06	0,07	0,07	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	11,21	11,15	11,30	11,46	11,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,04	14,45	14,84	15,25	15,31
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	2,31	2,36	2,39	2,42	2,43
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	11,73	12,10	12,45	12,82	12,88
Н	Transportasi dan Pergudangan	4,37	4,39	4,38	4,47	4,44
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	3,05	3,01	2,98	2,97	2,94
	3.Angkutan Laut	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	1,18	1,24	1,26	1,35	1,36
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,83	0,84	0,86	0,86
	1.Penyediaan Akomodasi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	2.Penyediaan Makan Minum	0,75	0,76	0,77	0,79	0,79
J	Informasi dan Komunikasi	1,87	1,89	1,95	1,97	2,01

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,91	2,05	2,14	2,20	2,28
	1. Jasa Perantara Keuangan	1,23	1,36	1,46	1,52	1,60
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,09	0,10	0,09	0,09
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,58	0,59	0,58	0,59	0,59
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estat	3,17	3,20	3,24	3,26	3,27
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,86	6,63	6,59	6,66	6,52
P	Jasa Pendidikan	4,90	4,83	4,94	5,03	5,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,10	2,15	2,18	2,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,04	2,02	2,06	2,06	2,07
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{* *} Angka sementara ** Angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 (Persen)

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,33	5,83	5,45	6,26	11,37
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	6,16	6,29	5,78	5,02	11,55
	a. Tanaman Pangan	11,21	8,38	7,86	1,86	14,17
	b.Tanaman Hortikultura	1,35	2,92	4,56	8,72	11,02
	c.Tanaman Perkebunan	0,81	8,16	1,17	5,94	5,65
	d.Peternakan	6,44	3,94	6,46	9,05	10,83
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	2,23	3,07	4,28	4,99	8,84
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,94	4,00	4,35	2,95	7,95
	3. Perikanan	7,16	3,64	3,83	12,45	10,57
В	Pertambangan dan Penggalian	7,43	8,91	8,54	11,62	14,65
С	Industri Pengolahan	3,92	5,59	1,96	7,68	3,39
D	Pengadaan Listrik & Gas	-3,20	13,79	-11,63	40,24	14,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,88	7,78	11,33	11,76	7,49
F	Konstruksi	9,13	5,96	8,05	11,14	16,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,33	12,08	10,36	15,14	11,96
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	9,44	13,55	9,81	10,83	10,60
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	15,30	11,80	10,47	15,97	12,21
н	Transportasi dan Pergudangan	7,38	7,51	7,47	14,72	10,67
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	6,48	5,31	6,19	10,61	8,92
	3.Angkutan Laut	0,65	7,42	5,01	13,68	11,23
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	10,21	12,91	10,11	24,78	13,94
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	4,77	10,49	12,37	9,34	14,43
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,15	9,69	17,15	17,02	11,93
	1.Penyediaan Akomodasi	13,15	12,16	16,86	24,66	12,02
	2.Penyediaan Makan Minum	10,96	9,46	17,18	16,29	11,92
J	Informasi dan Komunikasi	9,55	7,44	8,70	8,43	7,08

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	17,61	20,56	14,54	12,80	13,60
	1. Jasa Perantara Keuangan	22,66	26,82	18,71	13,24	15,40
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	4,00	4,36	7,91	7,46	9,18
	3. Jasa Keuangan Lainnya	9,90	9,26	4,78	12,38	8,93
	4. Jasa Penunjang Keuangan	10,30	7,78	12,46	12,80	9,09
L	Real Estat	13,65	12,58	12,19	13,06	9,74
M,N	Jasa Perusahaan	8,79	10,14	9,93	13,31	9,83
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,13	8,38	9,85	16,88	11,29
P	Jasa Pendidikan	15,05	9,84	12,68	9,40	12,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,27	5,50	10,35	11,29	11,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,98	6,46	9,37	9,09	11,90
	PDRB	9,21	7,93	7,85	10,62	11,48

^{*} Angka sementara ** Angka sangat sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2011–2015 (Persen)

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,03	4,46	3,51	1,98	5,20
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	4,72	4,75	3,62	1,20	5,32
	a. Tanaman Pangan	8,84	6,43	5,80	-0,31	8,55
	b.Tanaman Hortikultura	0,77	2,04	0,86	2,86	2,52
	c.Tanaman Perkebunan	-0,23	6,31	0,77	1,71	-0,42
	d.Peternakan	5,81	2,86	4,76	3,19	5,16
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	1,24	2,48	2,39	1,09	6,80
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,36	3,13	2,45	1,63	2,39
	3. Perikanan	6,59	3,12	2,98	5,75	4,61
В	Pertambangan dan Penggalian	6,55	7,39	7,22	6,16	8,83
С	Industri Pengolahan	2,62	5,10	1,20	1,68	2,54
D	Pengadaan Listrik & Gas	7,01	11,38	4,58	39,05	0,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,81	1,47	5,92	5,04	4,06
F	Konstruksi	7,80	4,93	6,93	6,26	8,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,34	8,50	8,32	7,67	6,36
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	7,85	7,52	6,94	6,39	6,18
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9,64	8,69	8,59	7,92	6,40
н	Transportasi dan Pergudangan	5,76	5,84	5,38	6,86	5,10
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	4,96	3,95	4,56	4,64	4,53
	3.Angkutan Laut	-1,14	6,08	2,54	7,07	3,64
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	8,32	10,75	7,40	12,27	6,40
	5.Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	3,10	5,78	5,86	5,03	4,94
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	5,91	7,42	6,59	6,40
	1.Penyediaan Akomodasi	6,38	4,01	7,08	7,25	4,43
	2.Penyediaan Makan Minum	6,25	6,09	7,45	6,53	6,58
J	Informasi dan Komunikasi	10,11	7,02	8,80	5,98	7,98

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,00	12,83	10,31	8,01	9,79
	1. Jasa Perantara Keuangan	15,82	16,18	13,42	9,04	11,68
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	3,09	2,84	6,17	3,77	5,40
	3. Jasa Keuangan Lainnya	9,09	7,38	3,83	6,12	5,61
	4. Jasa Penunjang Keuangan	6,49	5,46	4,44	6,19	5,64
L	Real Estat	6,28	6,55	6,70	5,51	6,26
M,N	Jasa Perusahaan	6,92	7,56	6,55	6,46	4,87
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	1,83	4,92	5,93	3,67
P	Jasa Pendidikan	7,46	3,89	7,99	6,73	5,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,57	3,52	7,89	6,43	6,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,63	4,17	7,33	5,13	6,07
	PDRB	6,23	5,43	5,51	4,79	5,91

^{*} Angka sementara ** Angka sangat sementara

Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106,33	112,52	118,65	126,08	140,42
	 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 	106,16	112,83	119,35	125,34	139,82
	a. Tanaman Pangan	111,21	120,53	130,01	132,43	151,19
	b.Tanaman Hortikultura	101,35	104,32	109,08	118,59	131,66
	c.Tanaman Perkebunan	100,81	109,03	110,31	116,86	123,46
	d.Peternakan	106,44	110,64	117,78	128,44	142,35
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	102,23	105,37	109,88	115,36	125,56
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	102,94	107,06	111,72	115,01	124,16
	3. Perikanan	107,16	111,06	115,32	129,68	143,39
В	Pertambangan dan Penggalian	107,43	117,00	126,99	141,74	162,50
C	Industri Pengolahan	103,92	109,73	111,88	120,48	124,57
D	Pengadaan Listrik & Gas	96,80	110,15	97,34	136,52	156,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	109,88	118,43	131,84	147,35	158,38
F	Konstruksi	109,13	115,63	124,94	138,86	162,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114,33	128,14	141,41	162,82	182,30
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	109,44	124,27	136,47	151,25	167,28
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	115,30	128,91	142,40	165,14	185,30
н	Transportasi dan Pergudangan	107,38	115,45	124,07	142,33	157,52
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	106,48	112,13	119,08	131,71	143,46
	3.Angkutan Laut	100,65	108,12	113,54	129,07	143,56
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	110,21	124,44	137,02	170,98	194,82
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	104,77	115,77	130,09	142,25	162,77
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	111,15	121,92	142,83	167,13	187,07
	1.Penyediaan Akomodasi	113,15	126,91	148,31	184,88	207,10
	2.Penyediaan Makan Minum	110,96	121,46	142,33	165,51	185,24
J	Informasi dan Komunikasi	109,55	117,70	127,93	138,72	148,54

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	117,61	141,79	162,41	183,21	208,12
	1. Jasa Perantara Keuangan	122,66	155,56	184,66	209,12	241,33
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	104,00	108,53	117,12	125,85	137,41
	3. Jasa Keuangan Lainnya	109,90	120,07	125,82	141,39	154,03
	4. Jasa Penunjang Keuangan	110,30	118,89	133,70	150,81	164,52
L	Real Estat	113,65	127,95	143,55	162,30	178,11
M,N	Jasa Perusahaan	108,79	119,82	131,72	149,25	163,93
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114,13	123,70	135,89	158,83	176,75
P	Jasa Pendidikan	115,05	126,37	142,40	155,78	174,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,27	115,28	127,21	141,57	157,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	108,98	116,02	126,89	138,42	154,89
	PDRB	106,33	112,52	118,65	126,08	140,42

^{*} Angka sementara ** Angka sangat sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	105,03	109,72	113,58	115,83	121,85
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	104,72	109,69	113,66	115,03	121,15
	a. Tanaman Pangan	108,84	115,83	122,55	122,17	132,62
	b.Tanaman Hortikultura	100,77	102,82	103,71	106,67	109,36
	c.Tanaman Perkebunan	99,77	106,06	106,87	108,70	108,25
	d.Peternakan	105,81	108,84	114,02	117,66	123,72
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	101,24	103,75	106,23	107,39	114,69
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	102,36	105,57	108,16	109,92	112,55
	3. Perikanan	106,59	109,92	113,19	119,70	125,22
В	Pertambangan dan Penggalian	106,55	114,43	122,69	130,25	141,75
C	Industri Pengolahan	102,62	107,85	109,14	110,97	113,79
D	Pengadaan Listrik & Gas	107,01	119,19	124,64	173,32	174,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	103,81	105,33	111,57	117,18	121,94
F	Konstruksi	107,80	113,11	120,94	128,51	139,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109,34	118,63	128,50	138,36	147,17
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	107,85	115,96	124,01	131,94	140,09
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	109,64	119,17	129,40	139,65	148,58
н	Transportasi dan Pergudangan	105,76	111,94	117,97	126,06	132,49
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	104,96	109,11	114,08	119,37	124,78
	3.Angkutan Laut	98,86	104,87	107,53	115,13	119,32
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	108,32	119,96	128,84	144,65	153,91
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	103,10	109,07	115,46	121,27	127,27
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,26	112,55	120,90	128,87	137,12
	1.Penyediaan Akomodasi	106,38	110,64	118,47	127,06	132,68
	2.Penyediaan Makan Minum	106,25	112,72	121,12	129,04	137,53
J	Informasi dan Komunikasi	110,11	117,84	128,21	135,88	146,72

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	113,00	127,50	140,65	151,91	166,79
	1. Jasa Perantara Keuangan	115,82	134,56	152,61	166,41	185,85
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	103,09	106,02	112,56	116,80	123,11
	3. Jasa Keuangan Lainnya	109,09	117,14	121,63	129,07	136,31
	4. Jasa Penunjang Keuangan	106,49	112,30	117,28	124,55	131,58
L	Real Estat	106,28	113,23	120,82	127,48	135,45
M,N	Jasa Perusahaan	106,92	115,00	122,53	130,45	136,81
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	103,99	105,89	111,10	117,69	122,00
P	Jasa Pendidikan	107,46	111,64	120,56	128,67	136,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,57	111,35	120,14	127,86	135,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	107,63	112,12	120,34	126,51	134,19
	PDRB	106,23	112,00	118,18	123,84	131,16

^{* *} Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2011–2015

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Α	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101,23	102,55	104,47	108,85	115,24
	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	101,38	102,87	105,01	108,97	115,41
	a. Tanaman Pangan	102,18	104,06	106,09	108,40	114,01
	b.Tanaman Hortikultura	100,58	101,45	105,18	111,18	120,39
	c.Tanaman Perkebunan	101,04	102,80	103,22	107,51	114,06
	d.Peternakan	100,59	101,66	103,30	109,17	115,06
	e.Jasa Pertanian dan Perburuan	100,98	101,57	103,44	107,42	109,48
	2.Kehutanan dan Penebangan Kayu	100,56	101,41	103,29	104,63	110,31
	3. Perikanan	100,54	101,04	101,88	108,34	114,50
В	Pertambangan dan Penggalian	100,82	102,24	103,51	108,83	114,64
С	Industri Pengolahan	101,27	101,74	102,51	108,56	109,47
D	Pengadaan Listrik & Gas	90,46	92,42	78,10	78,77	89,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,85	112,44	118,18	125,74	129,88
F	Konstruksi	101,24	102,23	103,31	108,06	116,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	104,56	108,01	110,05	117,68	123,87
	 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 	101,48	107,17	110,04	114,63	119,41
	2.Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	105,17	108,18	110,05	118,25	124,71
Н	Transportasi dan Pergudangan	101,54	103,14	105,18	112,91	118,90
	1.Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2.Angkutan Darat	101,45	102,78	104,38	110,34	114,97
	3.Angkutan Laut	101,81	103,10	105,59	112,11	120,32
	4.Angkutan Sungai Danau&Penyeberangan	101,75	103,73	106,35	118,20	126,58
	5.Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6.Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	101,62	106,14	112,68	117,30	127,90
ı	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104,60	108,33	118,14	129,69	136,43
	1.Penyediaan Akomodasi	106,37	114,71	125,18	145,51	156,08
	2.Penyediaan Makan Minum	104,43	107,75	117,51	128,26	134,69
J	Informasi dan Komunikasi	99,49	99,88	99,78	102,09	101,24

	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,08	111,21	115,47	120,60	124,78
	1. Jasa Perantara Keuangan	105,91	115,61	121,00	125,67	129,85
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	100,87	102,37	104,05	107,75	111,62
	3. Jasa Keuangan Lainnya	100,74	102,50	103,44	109,55	113,00
	4. Jasa Penunjang Keuangan	103,58	105,86	114,00	121,09	125,04
L	Real Estat	106,94	113,00	118,81	127,32	131,49
M,N	Jasa Perusahaan	101,75	104,19	107,49	114,41	119,82
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	109,76	116,82	122,32	134,96	144,88
P	Jasa Pendidikan	107,07	113,20	118,12	121,07	128,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,58	103,53	105,89	110,72	116,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	101,25	103,48	105,44	109,41	115,43
	PDRB	101,23	102,55	104,47	108,85	115,24

^{*} Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 10. Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Juta Rp)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.531.741,5	9.410.447,1	10.070.385,1	10.967.265,0	11.717.258,3
a. Makanan, Minuman dan Rokok	4.119.772,7	4.426.914,5	4.551.047,3	4.921.098,8	5.196.538,8
b. Pakaian dan Alas Kaki	282.742,3	309.382,9	324.990,6	345.772,3	374.926,1
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	1.455.914,6	1.613.345,0	1.819.528,1	2.055.753,3	2.208.235,5
d. Kesehatan dan Pendidikan	827.857,5	943.420,0	1.007.166,8	1.107.465,6	1.202.472,4
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	1.126.215,7	1.259.449,8	1.404.229,1	1.502.199,5	1.610.462,5
f. Hotel dan Restoran	289.354,8	340.301,5	384.588,2	423.514,3	457.139,6
g. Lainnya	429.884,0	517.633,4	578.835,0	611.461,2	667.483,3
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	253.538,1	280.812,8	326.911,4	395.557,4	431.949,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.636.006,8	1.747.480,8	1.930.337,4	2.584.556,9	2.951.378,5
a. Konsumsi Kolektif	869.460,1	918.550,2	1.026.350,1	1.324.458,7	1.469.379,7
b. Konsumsi Individu	766.546,7	828.930,6	903.987,3	1.260.098,2	1.481.998,8
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.429.174,7	3.853.784,0	4.133.068,2	4.533.857,2	5.220.079,1
a. Bangunan	2.810.065,0	3.076.475,6	3.270.035,9	3.545.190,3	4.087.395,8
b.Non-Bangunan	619.109,6	777.308,4	863.032,3	988.666,9	1.132.683,3
5. Perubahan Inventori	114.786,6	121.317,3	1.424,1	31.366,3	13.432,6
6. Ekspor Luar Negeri	19.711,6	22.425,9	24.735,1	34.621,8	37.752,7
a. Barang	8.821,9	9.697,5	10.677,4	13.024,5	14.766,7
b.Jasa	10.889,7	12.728,4	14.057,8	21.597,3	22.986,1
7. Impor Luar Negeri	334.766,3	338.398,0	381.276,6	383.891,3	506.449,1
a. Barang	263.970,4	258.703,5	284.302,4	250.058,0	315.177,2
b.Jasa	70.795,9	79.694,5	96.974,2	133.833,2	191.271,9
8. Net Ekspor Antar Daerah	(3.730.303,8)	(4.390.884,7)	(4.557.810,2)	(5.388.768,5)	(5.624.851,8)
a. Ekspor	1.791.165,9	1.955.018,9	1.744.844,7	1.898.258,7	1.937.767,8
b. Impor	5.521.469,6	6.345.903,7	6.302.654,8	7.287.027,2	7.562.619,6
PDRB	9.919.889,2	10.706.985,2	11.547.774,6	12.774.564,8	14.240.549,5

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 11. Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Juta Rp)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.275.862,8	8.695.527,9	8.989.481,8	9.430.497,4	9.831.041,3
a. Makanan, Minuman dan Rokok	4.027.216,2	4.121.283,7	4.176.086,1	4.373.903,8	4.508.540,7
b. Pakaian dan Alas Kaki	273.153,9	286.010,8	295.578,9	306.718,7	320.882,5
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	1.391.232,8	1.519.240,0	1.624.648,2	1.738.507,4	1.829.946,6
d. Kesehatan dan Pendidikan	784.141,3	842.566,9	871.701,8	925.521,0	980.278,0
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	1.095.322,8	1.175.501,3	1.235.276,1	1.274.679,0	1.333.587,8
f. Hotel dan Restoran	285.432,9	297.090,2	311.614,6	336.543,3	354.563,0
g. Lainnya	419.362,8	453.835,0	474.576,1	474.624,2	503.242,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	249.181,7	266.015,7	290.755,2	319.908,2	331.664,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.543.572,8	1.588.126,6	1.684.941,4	1.825.911,8	1.876.860,2
a. Konsumsi Kolektif	834.596,6	855.643,6	917.592,2	944.626,5	965.421,5
b. Konsumsi Individu	708.976,2	732.483,1	767.349,3	881.285,3	911.438,7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.123.373,9	3.346.704,5	3.453.892,3	3.553.048,4	3.885.296,0
a. Bangunan	2.520.149,3	2.604.614,8	2.708.018,0	2.790.185,7	3.066.041,3
b.Non-Bangunan	603.224,6	742.089,7	745.874,3	762.862,7	819.254,7
5. Perubahan Inventori	109.852,9	109.978,4	1.121,8	17.809,9	10.448,6
6. Ekspor Luar Negeri	18.613,0	19.948,2	20.896,6	26.725,4	27.673,2
a. Barang	8.266,3	8.630,7	9.023,4	9.549,2	9.890,6
b.Jasa	10.346,7	11.317,6	11.873,3	17.176,2	17.782,6
7. Impor Luar Negeri	324.309,5	307.737,5	323.363,6	307.914,2	383.096,8
a. Barang	253.154,3	238.503,1	243.917,1	218.856,2	260.973,3
b.Jasa	71.155,2	69.234,4	79.446,5	89.057,9	122.123,5
8. Net Ekspor Antar Daerah	-3.346.492,0	-3.545.027,3	-3.383.162,3	-3.617.342,2	-3.666.335,4
a. Ekspor	1.718.897,2	1.790.537,5	1.641.493,1	1.193.134,9	1.138.864,0
b. Impor	5.065.389,2	5.335.564,9	5.024.655,4	4.810.477,1	4.805.199,4
PDRB * Angka sementara	9.649.655,6	10.173.536,5	10.734.563,2	11.248.644,7	11.913.551,1

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 12. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	86,01	87,89	87,21	85,85	82,28
a. Makanan, Minuman dan Rokok	41,53	41,35	39,41	38,52	36,49
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,85	2,89	2,81	2,71	2,63
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	14,68	15,07	15,76	16,09	15,51
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,35	8,81	8,72	8,67	8,44
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	11,35	11,76	12,16	11,76	11,31
f. Hotel dan Restoran	2,92	3,18	3,33	3,32	3,21
g. Lainnya	4,33	4,83	5,01	4,79	4,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,56	2,62	2,83	3,10	3,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,49	16,32	16,72	20,23	20,73
a. Konsumsi Kolektif	8,76	8,58	8,89	10,37	10,32
b. Konsumsi Individu	7,73	7,74	7,83	9,86	10,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,57	35,99	35,79	35,49	36,66
a. Bangunan	28,33	28,73	28,32	27,75	28,70
b.Non-Bangunan	6,24	7,26	7,47	7,74	7,95
5. Perubahan Inventori	1,16	1,13	0,01	0,25	0,09
6. Ekspor Luar Negeri	0,20	0,21	0,21	0,27	0,27
a. Barang	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
b.Jasa	0,11	0,12	0,12	0,17	0,16
7. Impor Luar Negeri	3,37	3,16	3,30	3,01	3,56
a. Barang	2,66	2,42	2,46	1,96	2,21
b.Jasa	0,71	0,74	0,84	1,05	1,34
8. Net Ekspor Antar Daerah	(37,60)	(41,01)	(39,47)	(42,18)	(39,50)
a. Ekspor	18,06	18,26	15,11	14,86	13,61
b. Impor	55,66	59,27	54,58	57,04	53,11
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 13. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	85,76	85,47	83,74	83,84	82,52
a. Makanan, Minuman dan Rokok	41,73	40,51	38,90	38,88	37,84
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,83	2,81	2,75	2,73	2,69
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	14,42	14,93	15,13	15,46	15,36
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,13	8,28	8,12	8,23	8,23
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	11,35	11,55	11,51	11,33	11,19
f. Hotel dan Restoran	2,96	2,92	2,90	2,99	2,98
g. Lainnya	4,35	4,46	4,42	4,22	4,22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,58	2,61	2,71	2,84	2,78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,00	15,61	15,70	16,23	15,75
a. Konsumsi Kolektif	8,65	8,41	8,55	8,40	8,10
b. Konsumsi Individu	7,35	7,20	7,15	7,83	7,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,37	32,90	32,18	31,59	32,61
a. Bangunan	26,12	25,60	25,23	24,80	25,74
b.Non-Bangunan	6,25	7,29	6,95	6,78	6,88
5. Perubahan Inventori	1,14	1,08	0,01	0,16	0,09
6. Ekspor Luar Negeri	0,19	0,20	0,19	0,24	0,23
a. Barang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
b.Jasa	0,11	0,11	0,11	0,15	0,15
7. Impor Luar Negeri	3,36	3,02	3,01	2,74	3,22
a. Barang	2,62	2,34	2,27	1,95	2,19
b.Jasa	0,74	0,68	0,74	0,79	1,03
8. Net Ekspor Antar Daerah	-34,68	-34,85	-31,52	-32,16	-30,77
a. Ekspor	17,81	17,60	15,29	10,61	9,56
b. Impor	52,49	52,45	46,81	42,76	40,33
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Angka sementara					

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 14. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen)

(1)	Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
a. Makanan, Minuman dan Rokok 7,00 7,46 2,80 8,13 5,60 b. Pakaian dan Alas Kaki 7,38 9,42 5,04 6,39 8,43 c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta 9,19 10,81 12,78 12,98 7,42 d. Kesehatan dan Pendidikan 12,40 13,96 6,76 9,96 8,58 e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya 11,99 11,83 11,50 6,98 7,21 f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b.Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b. Pakaian dan Alas Kaki 7,38 9,42 5,04 6,39 8,43 c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta 9,19 10,81 12,78 12,98 7,42 d. Kesehatan dan Pendidikan 12,40 13,96 6,76 9,96 8,58 e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya 11,99 11,83 11,50 6,98 7,21 f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor S,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,01	10,30	7,01	8,91	6,84
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta d. Kesehatan dan Pendidikan 12,40 13,96 6,76 9,96 8,58 e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya 11,99 11,83 11,50 6,98 7,21 f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b.Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08	a. Makanan, Minuman dan Rokok	7,00	7,46	2,80	8,13	5,60
d. Kesehatan dan Pendidikan 12,40 13,96 6,76 9,96 8,58 e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya 11,99 11,83 11,50 6,98 7,21 f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b.Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08	b. Pakaian dan Alas Kaki	7,38	9,42	5,04	6,39	8,43
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08	c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	9,19	10,81	12,78	12,98	7,42
f. Hotel dan Restoran 7,92 17,61 13,01 10,12 7,94 g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01	d. Kesehatan dan Pendidikan	12,40	13,96	6,76	9,96	8,58
g. Lainnya 16,39 20,41 11,82 5,64 9,16 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b. Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor S,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor	e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	11,99	11,83	11,50	6,98	7,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,63 10,76 16,42 21,00 9,20 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05)	f. Hotel dan Restoran	7,92	17,61	13,01	10,12	7,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,24 6,81 10,46 33,89 14,19 a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04	g. Lainnya	16,39	20,41	11,82	5,64	9,16
a. Konsumsi Kolektif 10,70 5,65 11,74 29,05 10,94 b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b. Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,63	10,76	16,42	21,00	9,20
b. Konsumsi Individu 11,87 8,14 9,05 39,39 17,61 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b. Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,24	6,81	10,46	33,89	14,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 14,44 12,38 7,25 9,70 15,14 a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b. Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	a. Konsumsi Kolektif	10,70	5,65	11,74	29,05	10,94
a. Bangunan 14,67 9,48 6,29 8,41 15,29 b.Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor	b. Konsumsi Individu	11,87	8,14	9,05	39,39	17,61
b.Non-Bangunan 13,41 25,55 11,03 14,56 14,57 5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	14,44	12,38	7,25	9,70	15,14
5. Perubahan Inventori 4,36 5,69 (98,83) 2.102,54 (57,17) 6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b. Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	a. Bangunan	14,67	9,48	6,29	8,41	15,29
6. Ekspor Luar Negeri 4,13 13,77 10,30 39,97 9,04 a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	b.Non-Bangunan	13,41	25,55	11,03	14,56	14,57
a. Barang 3,17 9,93 10,10 21,98 13,38 b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	5. Perubahan Inventori	4,36	5,69	(98,83)	2.102,54	(57,17)
b.Jasa 4,93 16,88 10,44 53,63 6,43 7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b. Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	6. Ekspor Luar Negeri	4,13	13,77	10,30	39,97	9,04
7. Impor Luar Negeri (6,48) 1,08 12,67 0,69 31,93 a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b. Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	a. Barang	3,17	9,93	10,10	21,98	13,38
a. Barang (5,99) (2,00) 9,90 (12,05) 26,04 b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	b.Jasa	4,93	16,88	10,44	53,63	6,43
b.Jasa (8,26) 12,57 21,68 38,01 42,92 8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	7. Impor Luar Negeri	(6,48)	1,08	12,67	0,69	31,93
8. Net Ekspor Antar Daerah 15,72 17,71 3,80 18,23 4,38 a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	a. Barang	(5,99)	(2,00)	9,90	(12,05)	26,04
a. Ekspor 5,23 9,15 (10,75) 8,79 2,08 b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	b.Jasa	(8,26)	12,57	21,68	38,01	42,92
b. Impor 12,09 14,93 (0,68) 15,62 3,78	8. Net Ekspor Antar Daerah	15,72	17,71	3,80	18,23	4,38
	a. Ekspor	5,23	9,15	(10,75)	8,79	2,08
PDRB 9,21 7,93 7,85 10,62 11,48	b. Impor	12,09	14,93	(0,68)	15,62	3,78
	PDRB	9,21	7,93	7,85	10,62	11,48

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 15. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015 (Persen)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,74	5,07	3,38	4,91	4,25
a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,59	2,34	1,33	4,74	3,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,74	4,71	3,35	3,77	4,62
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	4,34	9,20	6,94	7,01	5,26
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,46	7,45	3,46	6,17	5,92
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	8,92	7,32	5,09	3,19	4,62
f. Hotel dan Restoran	6,46	4,08	4,89	8,00	5,35
g. Lainnya	13,54	8,22	4,57	0,01	6,03
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,84	6,76	9,30	10,03	3,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,96	2,89	6,10	8,37	2,79
a. Konsumsi Kolektif	6,26	2,52	7,24	2,95	2,20
b. Konsumsi Individu	3,47	3,32	4,76	14,85	3,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,24	7,15	3,20	2,87	9,35
a. Bangunan	2,84	3,35	3,97	3,03	9,89
b.Non-Bangunan	10,50	23,02	0,51	2,28	7,39
5. Perubahan Inventori	(0,13)	0,11	(98,98)	1.487,65	(41,33)
6. Ekspor Luar Negeri	(1,67)	7,17	4,75	27,89	3,55
a. Barang	(3,33)	4,41	4,55	5,83	3,58
b.Jasa	(0,30)	9,38	4,91	44,66	3,53
7. Impor Luar Negeri	(9,40)	(5,11)	5,08	(4,78)	24,42
a. Barang	(9,84)	(5,79)	2,27	(10,27)	19,24
b.Jasa	(7,79)	(2,70)	14,75	12,10	37,13
8. Net Ekspor Antar Daerah	3,81	5,93	(4,57)	6,92	1,35
a. Ekspor	0,98	4,17	(8,32)	(27,31)	(4,55)
b. Impor	2,83	5,33	(5,83)	(4,26)	(0,11)
PDRB * Angka sementara	6,23	5,43	5,51	4,79	5,91

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 16. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto adh Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015, (2010=100)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	109,01	110,30	107,01	108,91	106,84
a. Makanan, Minuman dan Rokok	107,00	107,46	102,80	108,13	105,60
b. Pakaian dan Alas Kaki	107,38	109,42	105,04	106,39	108,43
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	109,19	110,81	112,78	112,98	107,42
d. Kesehatan dan Pendidikan	112,40	113,96	106,76	109,96	108,58
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	111,99	111,83	111,50	106,98	107,21
f. Hotel dan Restoran	107,92	117,61	113,01	110,12	107,94
g. Lainnya	116,39	120,41	111,82	105,64	109,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	104,63	110,76	116,42	121,00	109,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	111,24	106,81	110,46	133,89	114,19
a. Konsumsi Kolektif	110,70	105,65	111,74	129,05	110,94
b. Konsumsi Individu	111,87	108,14	109,05	139,39	117,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	114,44	112,38	107,25	109,70	115,14
a. Bangunan	114,67	109,48	106,29	108,41	115,29
b.Non-Bangunan	113,41	125,55	111,03	114,56	114,57
5. Perubahan Inventori	104,36	105,69	1,17	2.202,54	42,83
6. Ekspor Luar Negeri	104,13	113,77	110,30	139,97	109,04
a. Barang	103,17	109,93	110,10	121,98	113,38
b.Jasa	104,93	116,88	110,44	153,63	106,43
7. Impor Luar Negeri	93,52	101,08	112,67	100,69	131,93
a. Barang	94,01	98,00	109,90	87,95	126,04
b.Jasa	91,74	112,57	121,68	138,01	142,92
8. Net Ekspor Antar Daerah	115,72	117,71	103,80	118,23	104,38
a. Ekspor	105,23	109,15	89,25	108,79	102,08
b. Impor	112,09	114,93	99,32	115,62	103,78
PDRB	109,01	110,30	107,01	108,91	106,84
* Angka sementara					

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 17. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto adh Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015, (2010=100)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	105,74	105,07	103,38	104,91	104,25
a. Makanan, Minuman dan Rokok	104,59	102,34	101,33	104,74	103,08
b. Pakaian dan Alas Kaki	103,74	104,71	103,35	103,77	104,62
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	104,34	109,20	106,94	107,01	105,26
d. Kesehatan dan Pendidikan	106,46	107,45	103,46	106,17	105,92
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	108,92	107,32	105,09	103,19	104,62
f. Hotel dan Restoran	106,46	104,08	104,89	108,00	105,35
g. Lainnya	113,54	108,22	104,57	100,01	106,03
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	102,84	106,76	109,30	110,03	103,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	104,96	102,89	106,10	108,37	102,79
a. Konsumsi Kolektif	106,26	102,52	107,24	102,95	102,20
b. Konsumsi Individu	103,47	103,32	104,76	114,85	103,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	104,24	107,15	103,20	102,87	109,35
a. Bangunan	102,84	103,35	103,97	103,03	109,89
b.Non-Bangunan	110,50	123,02	100,51	102,28	107,39
5. Perubahan Inventori	99,87	100,11	1,02	1.587,65	58,67
6. Ekspor Luar Negeri	98,33	107,17	104,75	127,89	103,55
a. Barang	96,67	104,41	104,55	105,83	103,58
b.Jasa	99,70	109,38	104,91	144,66	103,53
7. Impor Luar Negeri	90,60	94,89	105,08	95,22	124,42
a. Barang	90,16	94,21	102,27	89,73	119,24
b.Jasa	92,21	97,30	114,75	112,10	137,13
8. Net Ekspor Antar Daerah	103,81	105,93	95,43	106,92	101,35
a. Ekspor	100,98	104,17	91,68	72,69	95,45
b. Impor	102,83	105,33	94,17	95,74	99,89
PDRB * Angka sementara	105,74	105,07	103,38	104,91	104,25

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Lampiran 18. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011–2015, (2010=100)

Sektor	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103,09	108,22	112,02	116,30	119,19
a. Makanan, Minuman dan Rokok	102,30	107,42	108,98	112,51	115,26
b. Pakaian dan Alas Kaki	103,51	108,17	109,95	112,73	116,84
c. Peramhan, Perlengkpn & Penyelenggaraan Ruta	104,65	106,19	112,00	118,25	120,67
d. Kesehatan dan Pendidikan	105,58	111,97	115,54	119,66	122,67
e. Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	102,82	107,14	113,68	117,85	120,76
f. Hotel dan Restoran	101,37	114,54	123,42	125,84	128,93
g. Lainnya	102,51	114,06	121,97	128,83	132,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	101,75	105,56	112,44	123,65	130,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	105,99	110,03	114,56	141,55	157,25
a. Konsumsi Kolektif	104,18	107,35	111,85	140,21	152,20
b. Konsumsi Individu	108,12	113,17	117,81	142,98	162,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	109,79	115,15	119,66	127,60	134,35
a. Bangunan	111,50	118,12	120,75	127,06	133,31
b.Non-Bangunan	102,63	104,75	115,71	129,60	138,26
5. Perubahan Inventori	104,49	110,31	126,95	176,12	128,56
6. Ekspor Luar Negeri	105,90	112,42	118,37	129,55	136,42
a. Barang	106,72	112,36	118,33	136,39	149,30
b.Jasa	105,25	112,47	118,40	125,74	129,26
7. Impor Luar Negeri	103,22	109,96	117,91	124,67	132,20
a. Barang	104,27	108,47	116,56	114,26	120,77
b.Jasa	99,50	115,11	122,06	150,28	156,62
8. Net Ekspor Antar Daerah	111,47	123,86	134,72	148,97	153,42
a. Ekspor	104,20	109,19	106,30	159,10	170,15
b. Impor	109,00	118,94	125,43	151,48	157,38
PDRB	102,80	105,24	107,58	113,57	119,53

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur

Jln. Prof. Soepomo Nomor 20 Selong Lombok Timur Telp. (0376) 21212 Fax (0376) 21371 http://bappeda.lomboktimurkab.go.id/